

AKTIVITAS *SPIN DOCTOR* MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR 2018 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SRY AYU B. MADJID
NIM: 50100113050

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sry Ayu B. Madjid
NIM : 50100113050
Tempat/Tgl. Lahir : Bantaeng, 09 Mei 1995
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : BTN Makkio Baji Blok B10 No. 37 Antang
Judul : Aktivitas *Spin Doctor* Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 06 Desember 2017

Penulis,

Sry Ayu B. Madjid

NIM: 50100113050

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga skripsi yang berjudul “*Aktivitas Spin Doctor Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan*” ini dapat diselesaikan dengan baik guna untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Salam dan Shalawat selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. yang senantiasa menjadi suritauladan bagi setiap ummat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan tantangan karena keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan ilmiah, waktu, biaya, dan tenaga. Dengan komitmen yang kuat serta adanya petunjuk dan saran-saran berbagai pihak, semua rintangan dan tantangan dapat diminimalkan. Maka dari itu saya mempersembahkan karya ini buat kedua orang tua tercinta Ayahanda Bahar Madjid, SP, MM dan Marwani, S. Sos serta Saudara (i) saya Irwan B. Madjid, Sry Yustika B. Madjid, Irfan B. Madjid, Sry Vidya Januarty B. Madjid, Ilham B. Madjid dan Iqbal B. Madjid yang tidak henti-hentinya mencurahkan do’a, kasih sayang serta motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd.M.Si.,M.M. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. H. Kamaluddin Tajibu, M.Si dan Dra. Asni Djamereng, M.Si masing-masing Ketua dan Sekertaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahnya kepada penulis.
4. Dr. Firdaus Muhammad, MA dan Dr. H. KamaluddinTajibu, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberi petunjuk, nasehat dan bimbingannya dengan tulus sejak awal sampai rampungnya skripsi ini.
5. Dr. Arifuddin Tike, M. Sos. I dan Dr. Abdul Halik, M.Si selaku Munaqisy I dan Munaqisy II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan demi menyempurnakan skripsi ini.
6. M. Hidayat, SE.I,MM selaku staf jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang penuh kesabaran memenuhi seluruh kebutuhan persuratan penulis.
7. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para staf dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu dalam pengurusan berkas. Terimakasih juga kepada jasa pustakawan pusat dan fakultas yang telah banyak membantu dalam penyediaan referensi tulisan yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Teruntuk teman-teman seangkatan KPI 2013 terutama kelas B, terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin dan buat Adik-adik 2014-2017 serta kakak-kakak Angkatan 2006-2012.

9. Teman-teman KKN-Reguler Angkatan 53 Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa khususnya Kelurahan Manjapai yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi peneliti.
10. Sahabat-sahabat Haan Glow, Cikal The Adventure, dan triple A yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan selama proses pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Komunitas Grapik yang mengenalkan saya dunia kepenulisan yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi.
12. Seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, tiada yang dapat penulis persembahkan selain do'a, semoga amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan pahala disisi Allah swt. Dan dengan rendah hati penulis memohon maaf, sekaligus akan berusaha untuk memperbaiki jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, baik secara substansi maupun secara metodologis.

Wassalam

Makassar, 10 November 2017

Penulis,

Sry Ayu B. Madjid
NIM. 50100113050

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Kegunaan.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Teoritis Komunikasi Politik	8
B. Aktivitas <i>Spin Doctor</i>	12
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan.....	38
B. Aktivitas <i>Spin Doctor</i> Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan	50
C. Strategi <i>Spin Doctor</i> Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Implikasi Penelitian.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Sry Ayu B. Madjid
NIM : 50100113050
Judul : Aktivitas *Spin Doctor* Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Aktivitas *spin doctor* menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, 2) Strategi *spin doctor* menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan komunikasi politik. Sumber data primer penelitian ini adalah Tim Pemenangan Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar, Tim Pemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, Tim Pemenangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar, Tim Media Center Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar, Tim Media Center Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, Partai Pengusung Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar, dan Partai Pengusung Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Metode pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui empat tahap : reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas *spin doctor* menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas bakal calon kandidat yang diusungnya agar mendapat dukungan dari partai politik ialah 1) mempromosikan kelebihan dan kegiatan sosialisasi kandidat, 2) meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya, 3) menyusun *tagline*, 4) menyampaikan visi misi program kerakyatan. Strategi *spin doctor* menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan ialah mendekati partai politik dan menjaga partai pengusung supaya tidak mengalihkan dukungannya.

Implikasi dari penelitian adalah tim pemenangan dan relawan dalam perekrutan anggota tim harus lebih terstruktur agar mudah dikoordinasi dan penyebaran informasi harus lebih menyeluruh sampai ke tiap-tiap desa yang ada di Sulawesi Selatan sehingga mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidatnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan komunikasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini terlihat di kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun hingga tertidur kembali manusia selalu melakukan komunikasi. Seiring berkembangnya zaman, kajian teori komunikasi pun semakin berkembang, salahsatu di antaranya adalah komunikasi politik.

Komunikasi politik kini menjadi sebuah industri yang sangat berkembang di beberapa Negara dalam artian pemerintah bekerja sama dengan sebuah agen komunikasi guna meningkatkan kapasitasnya. Kualitas suatu komunikasi pemerintah sangat penting bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus ikut terlibat dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi mengenai kebijakan, ide atau gagasan dan keputusan antara pemerintah dan yang diperintah atau warga Negara.

Komunikasi politik merupakan suatu hubungan timbal balik antara politisi dengan konstituen atau seluruh warga yang bertempat tinggal di dalam daerah pemilihannya. Hal ini dilakukan demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsinya di pemerintahan.

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung dilaksanakan berdasarkan pasal 233 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah (pemda).¹ Gagasan utama dari pemilukada memang ideal, dimana rakyat di

¹ Sunarno Siswanto Slamet, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 65

tingkat lokal dapat berpartisipasi menentukan sendiri pimpinan daerahnya. Pada pelaksanaan pemilukada atau masa pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati di daerah (provinsi/kabupaten), warga masyarakat yang sudah punya hak untuk terlibat di dalam pemilukada jadi sasaran perebutan oleh kekuatan politik seperti partai politik.

Persaingan antara elit politik lokal dapat dimaknai suatu yang menegaskan berbagai perbedaan politik mereka demi mengartikulasikan kepentingan kelompok sosial yang diwakilinya. Perbedaan itu bersifat ideologis atau kebijakan, khususnya kebijakan yang hanya menguntungkan seseorang atau kelompok orang saja. Para politisi melibatkan jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif diprioritaskan sebagai gerbang untuk menjalankan perburuan kepentingan masing-masing, bukan untuk mewujudkan tujuan politik yang substantif yakni perjuangan untuk kebenaran dan keadilan untuk masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur yang akan diadakan Provinsi Sulawesi Selatan serentak dengan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati di 12 kabupaten/kota yang berada di Sulawesi Selatan.² Pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tahun 2018 yang akan datang merupakan pemilihan serentak yang kedua kalinya. Saat ini hampir setiap sudut wilayah Sulawesi Selatan dipenuhi atribut yang mewakili para bakal calon dengan nuansa promotif. Bahkan merambah ke media massa lainnya, seperti koran, radio, tv lokal, serta muncul di berbagai media sosial.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 18-24 Mei 2017, ada empat bakal calon gubernur dengan elektabilitas tinggi pada pilkada

² Abdul Aziz Alimuddin, "Pilgub Sulsel dan Pilkada di 12 Kabupaten Kota 2018, Takalar 2017", *Tribun Makassar*, 7 Februari 2016. <http://makassar.tribunnews.com/2016/02/07/pilgub-sulsel-dan-pilkada-di-12-kabupaten-kota-2018-takalar-2017> 1:37, (diakses 21 Juni 2017)

Sulawesi Selatan. Empat kandidat tersebut adalah Nurdin Abdullah, Ichsan Yasin Limpo, Nurdin Halid dan Agus Arifin Nu'mang.³ Berikut beberapa pasangan kandidat bakal calon gubernur yang diprediksi akan bertarung di tahun 2018 yang akan datang, diantaranya Nurdin Halid – Aziz Qahar Muzakkar, Nurdin Abdullah – Tanribali Lamo, Ichsan Yasin Limpo – Rusdi Masse, dan Agus Arifin Nu'mang – Isradi Zainal.⁴ Seiring berjalannya waktu pasangan bakal calon gubernur Sulawesi Selatan mengerucut menjadi tiga pasangan calon yaitu Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar. Hal ini terlihat dari perolehan rekomendasi partai yang diperolehnya. Beberapa hari menjelang pendaftaran calon Gubernur Agus Arifin Nu'mang cukup mengejutkan dengan muncul sebagai salah satu bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan berpasangan Tanribali Lamo. Sehingga diperoleh empat pasangan calon Gubernur yaitu Nurdin Halid – Aziz Qahar Muzakkar, Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman, Ichsan Yasin Limpo – Andi Muzakkar, dan Agus Arifin Nu'mang – Tanribali Lamo

Dunia politik tidak terlepas dari pencitraan sebagai suatu daya tarik terhadap para politisi. Citra banyak ditanamkan oleh para aktor kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan politik yang ingin dicapainya. Berbagai cara dilakukan oleh para politisi untuk menanamkan citra positif kepada masyarakat, diantaranya dengan melakukan kampanye politik, pemasaran politik dan kegiatan politik lainnya.

³ Robertus Belarminus, "Sulvei Poltracking: Ini Empat Kandidat Kuat di Pilgub Sulsel", *Kompas.com*, 13 Juni 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/13/19244231/survei.poltracking.ini.empat.kandidat.kuat.di.pilgub.sulsel>, (diakses 28 agustus 2017).

⁴ Jabbar Mohammad, "Mengemuka, Empat Pasangan Bakal Calon Gubernur di Pilkada Sulsel 2018", *Beritajeneponto*, 18 Juni 2017. <https://beritajeneponto.com/6499/mengemuka-empat-pasangan-bakal-calon-gubernur-di-pilkada-sulsel-2018>, (diakses 28 agustus 2017).

Citra positif diyakini sebagai bagian terpenting dari tumbuhnya prefensi-prefensi calon pemilih terhadap partai atau kandidat. Misalnya kalau seseorang memiliki citra yang lebih positif terhadap partai politik atau seorang kandidat tertentu (dibandingkan dengan partai – partai atau kandidat – kandidat lainnya yang berkompetensi), maka orang bersangkutan akan memberikan suara kepada partai politik atau kandidat bersangkutan asalkan tidak ada persoalan – persoalan yang membebani atau mengikatnya.

Salah satu cara untuk menanamkan citra positif kepada masyarakat ialah dengan melakukan *political spin*, atau disebut dengan istilah *spin doctor*. Tugasnya membuat sedemikian rupa, agar pemerintah dianggap atau seolah tak pernah salah.⁵ Hal inilah menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai langkah yang telah dilakukan *spin doctor* menjelang pemilihan kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 mendatang, dengan mengerucutkan menjadi Aktivitas Spin Doctor Menghadapi Pemilihan Gubernur 2018.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa penjabaran yang telah dijelaskan oleh peneliti pada latar belakang masalah penelitian di atas, peneliti dapat membuat suatu rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas *spin doctor* menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana strategi *spin doctor* menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan?

⁵ Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi Edisi Kedua*, h. 34

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus kajian yang akan dibahas peneliti berdasarkan pada judul dan rumusan masalah di atas ialah aktivitas *spin doctor* beberapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2018 mendatang, diantaranya Nurdin Halid dan Nurdin Abdullah. Aktivitas yang dimaksud ialah upaya atau kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi *spin doctor* dalam membentuk citra positif para bakal calon yang diusungnya.

Deskripsi Fokus

1. *Spin Doctor*

Spin doctor adalah sekelompok atau individu yang mampu meletakkan sebuah rencana yang baik pada sebuah media pemberitaan bagi perusahaan atau masalah-masalah politik. Louw menyatakan bahwa *spin doctor* adalah pemain politik dalam kaitannya penyebaran pesan melalui media yang bertujuan untuk mengarahkan opini publik.⁶

2. Pemilihan Gubernur

Pemilihan gubernur merupakan salah satu bentuk pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk administratif setempat yang memenuhi syarat dalam lingkup daerah tingkat provinsi. Pemilihan gubernur dilakukan satu paket bersama dengan wakil gubernur.

⁶ Rivi Handayani, "Peran *Spin Doctor* dalam Pembentukan Opini Publik Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa*, Vol. 16 no. 1 h. 51 (April 2013). http://www.academia.edu/25850954/Peran_Spin_Doctor_Dalam_Pembentukan_Opini_Publik_terhadap_ap_kandidat_kdh (Diakses 16 Juni 2017)

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul aktivitas *spin doctor* dalam menghadapi pemilihan gubernur Sulawesi Selatan, masih kurang dibahas sebagai karya ilmiah mendalam, khususnya pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Akan tetapi penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan judul penulis :

1. Kirana Ambarwati Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berjudul “Peran dan Strategi *Public Relation* dalam Membangun Citra”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang peran dan strategi yang digunakan oleh *public relations* PT. Persero Angkasa Pura dalam membangun citra. Adapun strategi yang digunakan dalam membangun citra adalah dengan *take off*.⁷

2. Irfan Samad, Jurusan Ilmu politik, Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berjudul “Peranan Tokoh Masyarakat terhadap Perilaku Memilih pada Pemilihan Gubernur Tahun 2013 di Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang peranan tokoh masyarakat dalam mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan gubernur tahun 2013 di kabupaten bulukumba, khususnya di Kelurahan Loka.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan *spin doctor* menjelang pemilihan gubernur 2018 di Sulawesi Selatan.

⁷ Kirana Ambarwati, “Peran dan Strategi *Public Relations* dalam Membangun Citra PT. (Persero) Angkasa Pura”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

- b. Untuk mengetahui strategi yang digunakan *spin doctor* menjelang pemilihan gubernur 2018 di Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan Penelitian :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan wawasan intelektual penulis mengenai *spin doctor* yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian komunikasi politik, terutama kajian yang berhubungan dengan *spin doctor*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan juga masukan akademis bagi para penggiat komunikasi politik dalam melakukan penelitian mengenai *spin doctor*.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis Tentang Komunikasi Politik

Manusia sebagai makhluk sosial selalu mencoba berkomunikasi dan membuat dirinya mengerti perihal sesuatu. Adapun definisi komunikasi yang di kemukakan oleh Ithiel de Sola Pool sebagaimana dikutip Henry Subiakto dan Rachmah Ida adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan.⁸ Dalam arti kompleks menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.⁹ Namun dalam berkomunikasi perlu memperhatikan unsur-unsur komunikasi, sebagaimana dituliskan Hafied Cangara dalam bukunya komunikasi dapat berjalan dengan baik jika telah memenuhi unsur-unsur komunikasi, yaitu sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik.¹⁰

Komunikasi sebagai ilmu sosial kini telah memasuki setiap lini kehidupan manusia dengan berkembang masuk pada bidang ilmu lainnya, seperti manajemen komunikasi, komunikasi bisnis, komunikasi kedokteran, komunikasi politik, dan lainnya. Komunikasi politik sebagai suatu sub-disiplin ilmu berpijak pada dua disiplin ilmu yang berbeda yaitu ilmu komunikasi dan ilmu politik.¹¹ Nimmo dalam bukunya

⁸ Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi Edisi Kedua*, h. 15

⁹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 19

¹⁰ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, h. 23

¹¹ Pawito, *Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan* (Jakarta: Jalasutra, 2009), h. 16

memandang inti komunikasi sebagai proses interaksi sosial dan inti politik sebagai konflik sosial.¹²

Bertolak dari konsep komunikasi dan konsep politik berikut beberapa definisi komunikasi politik :

1. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.¹³

2. Komunikasi politik menurut Richard Fagen adalah kegiatan komunikasi yang terdapat dalam suatu sistem politik yang mempunyai dampak secara aktual dan potensial.¹⁴

3. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sebagai sebuah disiplin ilmu, komunikasi politik bukanlah hal baru. Komunikasi politik dapat juga dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah dalam dunia politik.¹⁵

4. Denton dan Woodward dikutip oleh Brian McNair, keduanya menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan “*political communication as pure public discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision, and official sanctions (what the state rewards or punishes)*” (pembahasan murni tentang alokasi

¹² Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*, terj. Tjun Surjaman (Cet.VI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6-8

¹³ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik* (Yogyakarta: Genta Press, 2015), h. 17

¹⁴ Riswandi, *Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), H. 4

¹⁵ Michael Rush dan Philip Althoff, *Introduction to Political Sociology (Pengantar Sosiologi Politik)*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 24.

sumber daya publik (pendapatan), wewenang pejabat (siapa yang diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan hukum, legislatif, dan eksekutif), dan sanksi resmi (tindakan apa yang mendapat penghargaan atau hukuman dari negara).¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas, maka komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Hal inilah yang membedakan dengan disiplin komunikasi lainnya, perbedaannya terletak pada sifat atau isi pesannya. Sama halnya yang dikatakan Denton dan Woodward dalam McNair, mereka berpendapat faktor penting yang menjadikan komunikasi bersifat ‘politis’ bukanlah sumber pesannya [atau, dapat kami tambahkan mengacu kembali kepada penekanan awal pada ‘diskusi publik’, bentuknya], melainkan isi dan tujuannya.¹⁷ Oleh sebab itu, studi komunikasi politik memberi tekanan terhadap pesan – pesan yang mempengaruhi khalayak pemilih, terutama dari pesan – pesan politik, misalnya pidato dari kandidat, efektivitas strategi pencitraan yang dibuat dalam iklan kampanye, dan nilai informasi dari berita – berita yang menyangkut bidang pemerintahan dan partai politik.¹⁸

Bentuk-bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya, yaitu :

a. Retorika

Retorika berasal dari bahasa Yunani – *rhetorica*, yang berarti seni berbicara. Asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling memengaruhi sehingga bersifat kegiatan antarpersonal. Kemudian

¹⁶ Brian McNair, *An Introduction to Political Communication (Pengantar komunikasi Politik)*, terj. Imam muttaqien (Cet. I; Bandung: Nusa Media, 2016), h. 3

¹⁷ Brian McNair, *An Introduction to Political Communication (Pengantar komunikasi Politik)*, terj. Imam muttaqien, h. 4

¹⁸ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, h. 19-20

berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada orang banyak (khalayak).

b. Agitasi politik

Berasal dari bahasa Latin, *agitare*. Artinya, bergerak atau menggerakkan. Menurut Harbert Blumer, agitasi dilakukan untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan, dengan membangkitkan emosi khalayak.

c. Propaganda

Berasal dari bahasa Latin, *propagare* (menanamkan tunas suatu tanaman) yang pada awalnya sebagai bentuk kegiatan penyebaran agama Khatolik. Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda, yang mampu menjangkau khalayak kolektif lebih besar.

d. *Public Relations* (PR) politik

Tujuan PR politik adalah menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, profesional atau aktivis (komunikator) dan khalayak (kader, simpatisan, masyarakat umum).

e. Kampanye politik

Bentuk komunikasi yang dilakukan orang atau kelompok (organisasi) dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Kampanye politik merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

f. Lobi politik

Lobi politik adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader politik tentang kekuasaan, pengaruh, otoritas, konflik dan konsensus.

g. Media massa

Menurut McLuhan, sebagai perluasan panca indra manusia (*sense extention theory*) dan sebagai media pesan, dalam hal ini pesan politik untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan-otoritas, membentuk dan mengubah opini publik atau dukungan serta citra politik; untuk khalayak yang lebih luas yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain.¹⁹

B. Aktivitas Spin Doctor

Kampanye menurut Kotler dan Roberto dalam Hafied Cangara ialah: *“campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) wich intends to persuade others (the target adopters), to accept, modify or abadon certain ideas, attitudes, parctices and behavior”*. Kampanye adalah sebuah upaya yang diorganisir oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Mengubah sikap dan perilaku seseorang agar bisa menerima apa yang disampaikan, bukanlah pekerjaan mudah apalagi mengubah kepercayaan yang diyakininya selama ini. Sehingga dalam kampanye politik memerlukan sebuah perencanaan yang dramatis untuk mencapai target. Dengan kata lain, kampanye politik adalah sebuah peristiwa yang bisa didramatisir oleh para wartawan atau para aktor-aktor politik. Oleh karena itu, dalam buku komunikasi yang ditulis Hafied Cangara, Richard A Joslyn dalam Swanson melukiskan kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan oleh para aktor-aktor politik.²⁰

¹⁹ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik : Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 65-98

²⁰ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 230

Namun dalam prakteknya, tidak sedikit kegiatan kampanye yang dilakukan menemui kegagalan, tapi banyak juga yang berhasil karena dirancang dengan baik sesuai dengan prosedural perencanaan oleh seorang ahli yang berperan sebagai *spin doctor*.

Istilah *spin doctor* lebih dikenal dalam dunia kampanye politik sebagai konsultan *public relations* politik. Konsultan ini bertugas membangun *image* (citra) politik bagi kliennya (biasanya seorang politisi tertentu). Sedangkan tugas yang lainnya adalah memberikan kesan negatif pada saingan politik kliennya.²¹

Profesi konsultan *public relations* politik atau biasa disebut juga *press agent* atau *publicist* pertama didirikan oleh sepasang suami-istri Cleam Whittaker dan Leone Baxter di Los Angeles AS pada tahun 1933 dengan nama Campaign Inc. Dari kemunculan Campaign Inc, berkembanglah apa yang oleh Nimmo dinamakan 'industri pelayanan' di sepenjuru negeri. Istilah *public relations* konsultan politik ini digunakan sampai tahun 1984, setelah tim kampanye Ronald Reagan menggantikannya dengan istilah *spin doctor*.²²

Istilah *spin* sendiri merupakan kata *pejorative* yang digunakan untuk menjual pesan politik tertentu atau khusus secara canggih/*sophisticated*, yang mana pesan ini sangat bisa untuk mengamankan posisi dan kepentingan dari politisi yang membuat pernyataan atau pesan tertentu. Menurut lilleker *spin* ialah teknik *me-manage* atau mengatur media untuk menghindarkan para jurnalis media mendapatkan fakta pemberitaan yang objektif dan melakukan *assessment* terhadap informasi politik yang dimiliki oleh pemerintah atau presiden. *Spin* ini juga dilakukan untuk

²¹ Anisti, *Gaya Komunikasi Politik Megawati dan iklan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Kampanye Tahun 2009* (Akom BSI Jakarta), h. 133

²² Brian McNair, *An Introduction to Political Communication (Pengantar komunikasi Politik)*, terj. Imam muttaqien, h. 188-189

memengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat dengan cara menyampaikan informasi yang bias yang menyenangkan kepada masyarakat, agar opini masyarakat tidak berkembang secara negatif atau tidak mengenakan bagi pemerintah. Hal ini banyak dilakukan dalam komunikasi politik di Indonesia yang biasanya dilakukan dalam konferensi pers pemerintah yang diwakili oleh juru bicara atau langsung oleh presiden sendiri.²³

Adapun beberapa definisi *spin doctor* menurut para ahli, sebagai berikut :

1. *Spin doctor* menurut Louw sebagaimana dikutip Rivi Handayani adalah sekelompok atau individu yang mampu meletakkan sebuah rencana yang baik pada sebuah media pemberitaan bagi perusahaan atau masalah-masalah politik. Lebih lanjut Louw menyatakan bahwa *spin doctor* adalah pemain politik dalam kaitannya penyebaran pesan melalui media yang bertujuan untuk mengarahkan opini publik.²⁴

2. *Spin doctor* menurut Louw dikutip Ibnu Hajar dalam bukunya adalah kelompok atau individu yang mampu meletakkan *spin* (pemintalan) informasi dalam media yang bertujuan menciptakan citra sebuah perusahaan, partai atau kandidat.

3. Adapun menurut Graber dikutip McNair dalam bukunya *An Introduction to Political Communication* yang dikutip kembali Ibnu Hajar menyatakan *spin doctor* adalah individu yang memiliki kemampuan menguasai publik, menggerakkan massa dan menguasai media sekaligus sebagai konseptor politik yang bertujuan mempengaruhi.²⁵

²³ Henry Subiakto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi Edisi Kedua*, h. 33

²⁴ Rivi Handayani, "Peran *Spin Doctor* dalam Pembentukan Opini Publik Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa*, Vol. 16 no. 1 h. 51 (April 2013). http://www.academia.edu/25850954/Peran_Spin_Doctor_Dalam_Pembentukan_Opini_Publik_terhadap_kandidat_kdh (Diakses 16 Juni 2017)

²⁵ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, h. 27

4. Menurut Entman dikutip Louw bahwa mempengaruhi publik bukanlah suatu fenomena baru, penyampaian pesan politik di media massa secara umum menciptakan seni propaganda yang baru dalam kaitannya dengan mengarahkan opini publik dan membangun popularitas. Media dan jurnalis yang memegang peranan penting dalam proses mempengaruhi publik.²⁶

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *spin doctor* adalah orang yang mempunyai kemampuan merancang strategi kampanye, melalui media untuk memenangkan kandidat dalam pemilihan. Semakin ahli *spin doctor* dalam membangun hubungan dengan media, maka semakin mudah mempengaruhi publik untuk mencapai tujuannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aktivitas adalah keaktifan; kegiatan. Aktivitas adalah segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan – kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik. Sehingga aktivitas *spin doctor* ialah segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan *spin doctor* yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, baik itu itu fisik maupun non fisik.

Spin doctor atau dikenal dengan humas politik adalah orang yang bertugas untuk melakukan tugas – tugas *public relations* yang lebih kompleks.²⁷ Humas politik menjadi industri jasa pelayanan (*service industry*) yang memfasilitasi komunikasi politik diantara partai politik, kandidat dan publik. Humas juga mendesain dan memproduksi publisitas dan propaganda, mencari dana, memberi nasihat kebijakan dan presentasi dan polling opini publik, singkatnya bisa disebut

²⁶ Rivi Handayani, “Peran Spin Doctor dalam Pembentukan Opini Publik Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa*, Vol. 16 no. 1 h. 51 (April 2013). http://www.academia.edu/25850954/Peran_Spin_Doctor_Dalam_Pembentukan_Opini_Publik_terhadap_ap_kandidat_kdh (Diakses 16 Juni 2017)

²⁷ Henry Subiakto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi Edisi Kedua*, h. 31

sebagai ‘manajer panggung dan penulis kreatif dari teater politik yang hidup’.²⁸ Dengan kata lain *spin doctor* memiliki peran sebagai sutradara yang mengatur segala alur drama politik partai politik maupun kandidat. Berdasarkan kutipan di atas, dapat diuraikan bagaimana *spin doctor* berperan dalam kegiatan komunikasi politik yakni :

1. Peran pertama yang dilakoni *spin doctor* adalah memfasilitasi komunikasi politik diantara partai politik, kandidat, dan publik. Fasilitasi ini dapat berupa penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga konsultan humas politik maupun kegiatan yang langsung dilakukan oleh partai politik atau kandidat berdasarkan desain kegiatan yang sudah dirancang oleh *spin doctor*. Penyaluran bantuan yang dilakukan oleh partai politik pada korban bencana merupakan salah satu kegiatan yang bisa dikemas oleh *spin doctor* dalam rangka memfasilitasi komunikasi politik antara partai politik dengan khalayak.

2. Peran kedua yang dilakukan oleh *spin doctor* adalah mendesain dan memproduksi publisitas dan propaganda. Kegiatan desain dan produksi publisitas ini diantaranya adalah penyelenggaraan konferensi pers dan pengiriman rilis ke media massa.

Masyarakat Indonesia pada umumnya belum terlalu memahami profesi *spin doctor* ini. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih *familiar* dengan istilah tim sukses. Pada kenyataannya, *spin doctor* berbeda dengan tim sukses. Perbedaan ini terlihat pada deskripsi kerja keduanya, tim sukses bertugas mengorganisir masalah teknis, seperti mobilisasi massa, lokasi kampanye dan menjaga kesolidan suara dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Sementara *spin doctor* bertugas membentuk citra politisi melalui penampilan politisi di hadapan masyarakat, media cetak dan elektronik

²⁸ Fajar Junaedi, *Komunikasi Politik : Teori Aplikasi dan Strategi di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2013), h. 135

sehingga terbentuk opini positif yang dapat mengantarkan politisi memenangkan pemilihan.

Seorang *spin doctor* sebagai individu-individu yang bertugas membentuk *image* politisi dituntut memenuhi keahlian atau *tool*,²⁹ sebagai berikut :

- a. *Spin doctor* harus orang yang ahli media atau mengetahui media mana yang bisa menarik *audience*,
- b. Melakukan penelitian terhadap lawan politik adalah dimensi politik yang paling penting, dimana mereka harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai lawannya,
- c. *Spin doctor* harus mampu mengantisipasi sesuatu yang berjalan di luar rencana. Misalnya performa politikus kadang-kadang gagal karena jurnalis menampilkan berita yang buruk mengenai diri politikus dan merancang berita yang dapat menimbulkan kerusakan, *spin doctor* dituntut untuk mampu menyelesaikan krisis tersebut. Misalnya ketika isu negatif muncul mengenai politisi yang diwakilinya, *spin doctor* bertanggung jawab meredam isu itu dan mengubahnya menjadi isu yang positif.

Spin doctor berada pada posisi tengah antara politisi yang akan dipromosikan (dipasarkan) olehnya dengan para jurnalis media yang akan mempromosikannya. Sebagai praktisi seni *public relation* yang memiliki kemampuan membuat opini publik dan seni rekayasa visual yang mengandung daya persuasi politik, sehingga banyak pihak yang menilai bahwa profesi *spin doctor* yang digunakan oleh para

²⁹ Rivi Handayani, "Peran Spin Doctor dalam Pembentukan Opini Publik Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa*, Vol. 16 no. 1 h. 51 (April 2013). http://www.academia.edu/25850954/Peran_Spin_Doctor_Dalam_Pembentukan_Opin_Publik_terhadap_kandidat_kdh (Diakses 16 Juni 2017)

politisi adalah suatu keahlian di bidang komunikasi yang menggabungkan prinsip-prinsip *public relation*, periklanan dan pemasaran.

Peranan *spin doctor* tidak hanya berdiri antara partai politik dengan media, tetapi memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam kancah pertarungan kekuasaan politik. Ia dibutuhkan oleh para politisi, sebab semakin intent usaha untuk meraih tampak pimpinan, mereka semakin membutuhkan peran *spin doctor* sebagai *stage manager* yang mampu mengatur jalannya kampanye, memberi isi dalam naskah pidato, membuat agenda dan daftar pernyataan politik yang akan diucapkan oleh kandidat.³⁰

Teknik kehumasan politik yang dilakukan *spin doctor* dalam memoles citra ialah dengan taktik manajemen media dan informasi yang dirancang untuk memastikan bahwa partai atau kandidat yang diusungnya mendapatkan publisitas positif secara maksimal, dan publisitas negatif yang minimal.

Secara etimologis, citra berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti gambar. Kemudian dikembangkan menjadi gambaran sebagai padan kata *image* dalam bahasa Inggris.³¹ Citra positif adalah citra yang dikembangkan oleh para politisi baik itu saat memegang tanggung jawab publik atau jabatan pemerintahan, terlebih ketika ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam buku Anwar Arifin citra dibutuhkan dengan tujuan,³² sebagai berikut :

- a. Membentuk dan membina opini publik,
- b. Menggalang dan mendorong partisipasi politik,
- c. Memenangkan pemilihan umum,
- d. Merumuskan dan memutuskan kebijakan publik

³⁰ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, h. 27-28

³¹ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan – Pencitraan Politik Edisi 2* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 16

³² Anwar Arifin, *Politik Pencitraan – Pencitraan Politik Edisi 2*, h. 33

Spin doctor menggunakan semua jalur komunikasi untuk membangun citra politisi yang diusungnya, dengan membentuk dan mengarahkan opini publik guna memenangkan pemilihan, sekaligus mempengaruhi masyarakat agar tujuan yang mereka inginkan dapat tercapai. Dengan menggunakan media komunikasi dalam pembentukan opini publik, *spin doctor* merekayasa dengan cara-cara pemaksaan dalam kampanye menjadi bujukan.³³

Bujukan yang digunakan *spin doctor* inilah yang memerlukan keahlian *spin doctor* dalam meramu pesan agar terkesan menarik dan dapat diterima dengan baik sehingga mampu mempengaruhi atau mengubah pola pikir masyarakat. Untuk itu perlu kita ketahui pengertian dan unsur opini publik itu sendiri.

Anwar Arifin dalam bukunya menuliskan bahwa opini publik adalah pendapat rata-rata individu dalam masyarakat sebagai hasil diskusi tidak langsung yang dilakukan untuk memecahkan persoalan sosial, terutama yang dioperkan oleh media massa. Oleh sebab itu, opini publik hanya akan terbentuk jika ada isu yang dikembangkan oleh media massa (surat kabar, film, radio dan televisi) yang menyangkut kepentingan umum. Lebih lanjut, Anwar Arifin memetakan menjadi 4 bagian dari pengertian opini publik, yakni :

1. Opini publik adalah pendapat, sikap, perasaan, ramalan, pendirian, dan harapan rata-rata individu kelompok dalam masyarakat, tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan-persoalan sosial.
2. Opini publik adalah hasil interaksi, diskusi atau penilaian sosial antar individu tersebut yang dinyatakan baik lisan maupun tulisan.
3. Isu atau masalah yang didiskusikan itu adalah hasil dari apa yang dioperkan oleh media massa (baik media cetak maupun media elektronik).
4. Opini publik hanya dapat dikembangkan pada negara-negara yang menganut paham demokrasi. Dalam negara tersebut akan memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyatakan pendapat dan sikapnya, baik lisan maupun tulisan.

³³ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, h. 28

Dari pengertian di atas, Anwar arifin menyatakan bahwa opini publik memiliki paling kurang tiga unsur, diantaranya :

- a. Pertama, harus ada isu (peristiwa atau kata-kata) yang aktual, penting dan menyangkut kepentingan pribadi kebanyakan orang dalam masyarakat atau kepentingan umum, yang disiarkan melalui media massa.
- b. Kedua, harus ada sejumlah orang yang mendiskusikan isu tersebut, yang kemudian menghasilkan kata sepakat mengenai sikap, pendapat, dan pandangan mereka.
- c. Ketiga, selanjutnya pendapat mereka itu diekspresikan atau dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan gerak-gerik.³⁴

Opini publik tidaklah harus merupakan pendapat bulat dari semua orang, melainkan hanya pendapat sejumlah orang. Juga tidak mutlak merupakan pendapat mayoritas, tetapi mungkin hanya pendapat minoritas, dan bahkan mungkin hanya pendapat seseorang. Namun mampu *influence* atau mempengaruhi orang lain.

Membentuk opini publik bukanlah hal yang mudah, dalam proses pembentukan opini publik ada beberapa hal yang menyebabkan intens atau tidaknya opini seseorang terhadap suatu isu³⁵, antara lain :

- a. Karena benar-benar berkepentingan sendiri
- b. Menyangkut identifikasi kelompok tempatnya bergabung
- c. Menyangkut nilai-nilai sosial
- d. Karena kekhususan dari kepentingan spesial
- e. Karena merupakan bagian dari pola keterlibatan dan *concern* politiknya

Spin doctor sebagai perancang dan penyusun strategi kampanye, memerlukan sejumlah peralatan untuk menukseskan perannya sebagai pemain politik handal. Menurut Louw dalam Ibnu Hajar peralatan yang dimaksud,³⁶ antara lain :

- a. Pengetahuan mengenai praktek jurnalistik, utamanya dalam membuat agenda setting yang mampu menarik dan menanam citra (*image*) dalam pikiran khalayak.

³⁴ Anwar Arifin, *Politik Pencitraan – Pencitraan Politik Edisi 2*, h. 61-63

³⁵ Riswandi, *Komunikasi Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 26-27

³⁶ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, h. 28-29

- b. *Spin doctor* harus memiliki keahlian menggunakan media komunikasi.
- c. Melakukan riset terhadap kekuatan lawan politik dengan jalan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan *openensive* atau dengan cara *counter effect*.
- d. *Spin doctor* harus memiliki kemampuan daya prediksi terhadap sesuatu yang bisa terjadi diluar rencana. Misalnya performa politisi yang dipromosikan jadi buruk karena tampilan berita yang dibuat oleh wartawan, menangani krisis komunikasi, dan meredam berita yang merugikan pihaknya.
- e. *Spin doctor* dapat menggunakan media dengan baik dan mengendalikan pendapat umum melalui pesan-pesan yang dirancang secara *professional* tanpa kehilangan nilai estetika dan substansi pesan itu sendiri. Para *spin doctor* selain memiliki kemampuan praktisi, juga harus memiliki kemampuan analisis perencanaan media.
- f. Ia memiliki hubungan yang baik dengan media, dimana wartawan yang menjadi mitranya kadang tidak menyadari bahwa informasi atau rancangan yang dibuat oleh *spin doctor* mengandung pesan-pesan sponsor, dan bahkan ia bisa mengajak para wartawan melihat dunia dari sudut pandang yang lain.

Oleh karena tugas dan peran *spin doctor* adalah merencanakan dan mengelola kampanye, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan kampanye politik yang efektif adalah memilih orang yang bisa menguasai dan memahami perencanaan dan penggunaan media komunikasi. Bidang ini masuk dalam kajian perencanaan komunikasi.

“Communication planning is the technique of processing available alternatives for the accomplishment of communication goals. It involves rational decision making, control and logical allocation of communication resources” Jadi

perencanaan komunikasi adalah suatu teknik dalam memproses berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan komunikasi. Ia melibatkan pengambilan keputusan, pengendalian dan penetapan alokasi sumber-sumber daya komunikasi secara logis.³⁷

Dalam studi perencanaan komunikasi dikenal beberapa langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan sebuah kampanye. Assifi dan French dalam Ibnu Hajar menyusun delapan langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye,³⁸ yakni :

- a. Menganalisis masalah
- b. Menganalisis khalayak
- c. Merumuskan tujuan (*objective*)
- d. Memilih media
- e. Mengembangkan pesan
- f. Merencanakan produksi media
- g. Merencanakan manajemen program
- h. Monitoring dan evaluasi

Kedelapan langkah perencanaan komunikasi yang dijelaskan di atas seharusnya dimiliki dan mampu diaplikasikan oleh *spin doctor* sehingga kegiatan kampanye dapat lebih terstruktur dan dikoordinir dengan baik, untuk mencapai tujuannya memenangkan kandidatnya.

Menangani masalah komunikasi para perencana dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dengan strategi penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Strategi komunikasi diperlukan strategi komunikasi dengan mengkombinasikan semua unsur-unsur komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran atau media, penerima

³⁷ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, h. 29

³⁸ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, h. 30-31

sampai pada pengaruh atau efek yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.

Jika dilihat hubungan antara kebijakan, perencanaan, dan strategi, maka kebijakan adalah perencanaan pada tataran besar (strategi) yang menjadi payung dari perencanaan operasional, perencanaan adalah acuan dalam mengimplementasikan program, sementara strategi sebagai bagian dari perencanaan yang menetapkan cara-cara yang harus diambil dalam pengelolaan. Kadang strategi sangat sulit dibedakan dengan taktik, padahal taktik atau kiat merupakan bagian dari strategi yang sifatnya lebih detail dan menjadi patokan dalam bertindak secara taktis.

C. *Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)*

Samuel P. Huntington dalam Muhadam Labolo dan Teguh Ilham menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.³⁹

Demokrasi dapat dimengerti sebagai suatu sistem politik dimana semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara periodik dan bebas, yang secara efektif menawarkan peluang pada masyarakat untuk mengganti elit yang memerintah. Lebih lanjut, menurut Sundaussen dalam Ibnu Hajar, demokrasi juga bisa dipahami sebagai suatu “*policy*” dimana semua warga menikmati kebebasan untuk berbicara, kebebasan berserikat, mempunyai hak

³⁹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 45-46

yang sama di depan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya.⁴⁰ Sehingga dalam mewujudkan harapan-harapan demokrasi di atas diperlukan pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemilu adalah sarana dan wahana untuk membentuk suatu pemerintahan oleh rakyat secara demokratis. Dalam pengertian lain, pemilu adalah suatu proses yang mengizinkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih pemimpin yang akan mengatur rakyatnya.⁴¹

Secara konseptual Ibnu Tricahyono dalam Sulastomo menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana yang mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁴²

Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terlaksana apabila seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakannya itu bisa mematuhi dan menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan serta yang disepakati bersama. Untuk itu berikut nsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum⁴³ :

1. Objek pemilu yaitu warga negara yang memilih pemimpinnya
2. Sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elit atau para pejabat publik
3. Sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintah.

Pemilihan umum memiliki tiga fungsi penting dalam proses berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai:

⁴⁰ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, h. 1-2

⁴¹ Jumadi Rahman, *Asas dan Sistem Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999*

⁴² Sulastomo, *Demokrasi atau Democrazy* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 5

⁴³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis*, h. 57

1. Rotasi kekuasaan

Dalam sebuah negara demokrasi, rotasi kekuasaan mutlak harus ada. Seorang pemimpin selayaknya hanya memerintah dalam periode yang dibatasi (dua periode saja). Banyak kalangan yang menilai bahwa pemerintahan yang lebih dari dua kali periode akan menjurus ke arah pemerintahan diktator/tirani. Contoh yang bisa disebutkan, seperti Presiden Soeharto yang memerintah lebih dari 6 periode yakni dalam kurung waktu 32 tahun.

2. Menciptakan perwakilan politik (dalam lembaga eksekutif dan legislatif)

Pemilu bertujuan untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat di tingkat pusat dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Para calon wakil rakyat ini diusung oleh partai politik dan diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi penciptaan harapan dan keinginan rakyat.

3. Sarana Pendidikan Politik

Diketahui bersama pemilu tidak sekadar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Pendidikan politik menurut Alfian merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.⁴⁴

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-

⁴⁴ Budi Juliardi, *“Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi”* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), h. 94-95

Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.⁴⁵ Selanjutnya pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menyebutkan, “Gubernur, Bupati, Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.⁴⁶

Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, pucuk pemimpin pemerintahan di daerah berada pada seorang kepala daerah (penguasa daerah). Sistem pemilihannya pun di pengaruhi oleh tarik-menarik antara kepentingan-kepentingan elit politik dan kehendak publik yang telah berlangsung sejak kekuasaan lahir dalam suatu negara. Berikut variasi sistem pilkada :

- a. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah/pejabat pusat. Sistem ini diterapkan di negara-negara kesatuan (unitaris) yang masih mewarisi sistem monarki, emirat atau otorianisme, dengan variasi-variasi sistem pemerintahan sejenis.
- b. Sistem pemilihan perwakilan oleh dewan (*council*). Sistem ini digunakan hampir oleh dua pertiga negara-negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan negara kesatuan. Sebagian besar negara-negara tersebut terletak di Asia dan Amerika Selatan, termasuk negara berkembang dan negara industri.
- c. Sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem ini paling populer digunakan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan negara federasi, seperti Amerika Serikat, Jerman dan Kanada.

Dalam melaksanakan pilkada, Indonesia memilih kebijakan serupa dengan memberlakukan sistem pilkada secara langsung. Pilkada langsung merupakan

⁴⁵ Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 14-15

⁴⁶ Siti Aminah, *Kuasa Negara pana Ranah Politik Lokal* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 229

sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan pemilihan kepala daerah. Sebagai suatu sistem, pilkada memiliki ciri-ciri antara lain : memilih kepala daerah, setiap komponen yang terlibat dan kegiatan mempunyai batas, terbuka, tersusun dari berbagai kegiatan yang merupakan subsistem, setiap kegiatan saling terikat dan tergantung dalam suatu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol, kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri. Pendeknya, inti sistem pilkada adalah hubungan kebergantungan antar/setiap komponen yang terlibat dan antar kegiatan yang membentuk sistem.

Pilkada langsung diharapkan dapat mengeliminasi distorsi-distorsi demokrasi, seperti politik uang dan intervensi pengurus parpol dalam menentukan calon. Namun, harus dipahami bahwa manipulasi dan distorsi tidak dapat sepenuhnya dihapuskan karena pilkada langsung pun menggunakan sistem dan prosedur tertentu, yang harus memerhatikan ketersediaan sarana dan prasarana, serta situasi dan kondisi rakyat.

Argumen lain tentang pilkada langsung terkait dengan kedaulatan rakyat, menurut Ali Masykur Musa mencakup hal-hal⁴⁷ sebagai berikut:

1. Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh. Menjadi kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap salah satu hak politik rakyat, yaitu hak memilih calon pemimpin.
2. Wujud nyata asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Melalui pilkada langsung, seorang kepala daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada rakyat yang memilih. Kepala daerah yang tidak dapat memenuhi asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas akan ditinggalkan oleh rakyat, bahkan tidak ada yang memilihnya lagi. Oleh karena itu, dalam beberapa sistem pemilihan, calon kepala daerah harus memiliki *trade mark*, yakni ciri khas dalam prioritas program kerja yang harus dipertanggungjawabkan.

⁴⁷ Mahi M. Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*, (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.118 -122

Pemerintah lokal adalah sebuah wewenang yang diperoleh dari pemilihan langsung, mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan tidak membedakan pemberian pelayanan, dengan menyediakan waktu pelayanan yang panjang dan secara terus-menerus, serta bertanggungjawab kepada masyarakat yang telah memilihnya dalam area lokal. Dengan arti luas pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan suatu undang-undang, yang memiliki lembaga-lembaga / badan-badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut yang dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada didalam wilayah kekuasaannya⁴⁸

Sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat (1) dinyatakan, “Kepala daerah haruslah seorang yang dekat dan dikenal oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, dan karena itu kepala daerah haruslah seorang yang mendapat kepercayaan dari rakyat dan disertai kekuasaan atas kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk memenuhi maksud tersebut kepala daerah yang bersangkutan.”⁴⁹

Calon kepala daerah, sebagai politisi yang memiliki *das wollen* menjadi kepala daerah, dapat menggunakan komunikasi politik sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan keinginannya. Calon kepala daerah dapat menjadikan kegiatan komunikasi politik yakni, sosialisasi dan pendidikan politik, sebagai upaya real untuk meraih simpati dari rakyat pemilihannya. Untuk meraih simpati rakyat daerah, calon kepala daerah sebagai komunikator politik dapat mentransformasikan pesan-pesan politiknya secara langsung, melalui jejaring politik dan media massa.⁵⁰ Sebagaimana

⁴⁸ Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*, h 15

⁴⁹ Mahi M. Hikmat, *komunikasi Politik Teori dan Praktik*, , h. 125

⁵⁰ Hasrullah, *Pertarungan Elite dalam Bingkai Media* (Yogyakarta: Adil Media, 2010), h. 61

syarat utama politisi adalah mampu menjadi komunikator politik dalam menjalankan perannya.

Calon kepala daerah memungkinkan tampilnya calon perseorangan dalam pilkada langsung dengan argumen sumber kepemimpinan daerah tidak hanya dari partai, tetapi juga dari elemen-elemen lain, seperti organisasi massa dan LSM bahkan birokrat. Berdasarkan putusan MK yang dikuatkan UU No. 12/2008 lahir sebagai jawaban atas kehendak rakyat untuk lahirnya calon perseorangan. Secara tersurat dalam pasal 56 ayat (2) disebutkan, “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan UU ini.”

Pasal 59 ayat (2a)-nya disebutkan “pasangan calon perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan : a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen) ; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).”⁵¹

Pilkada langsung diselenggarakan oleh KPUD. UUD 1945 pasal 22E ayat (5) menyebutkan, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan

⁵¹ Mahi M. Hikmat. *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*, h. 181-182.

umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Penyebutan komisi pemilihan umum (KPU) dengan huruf kecil, tidak hanya menunjukkan KPU sebagai lembaga yang mengelola pemilu seperti yang ada sekarang dan beranak pinak di daerah menjadi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, tetapi menunjukkan penyelenggaraan pemilu yang namanya boleh apa saja. Bahkan, KPU yang dalam UUD 1945 ini telah melahirkan bayi kembar siam: KPU dan panwaslu.⁵²

KPU dan panwaslu merupakan kelompok yang berperan penting dalam kesuksesan pelaksanaan pilkada yang demokratis. Keduanya memiliki peran yang berbeda. KPU atau KPUD memiliki tugas yang terlibat langsung dalam proses pemungutan suara hingga penetapan calon kepala daerah terpilih. Sedangkan Panwaslu merupakan tim yang bertugas dalam pengawasan pilkada selama penyelenggaraan pilkada.

⁵² Mahi M. Hikmat. *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*, h. 201

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah).⁵³ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.⁵⁴ Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁵⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.⁵⁶ Untuk penulis meneliti atau menganalisa aktivitas *spin doctor* menjelang pemilihan Gubernur 2018 mendatang di Provinsi Sulawesi Selatan. Aktivitas yang dimaksud ialah aktivitas *spin doctor* dalam melaksanakan tugas dan tujuannya.

⁵³ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdaya Karya, 1995), h .15

⁵⁴ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h .11

⁵⁵ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h .14.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 61

2. Lokasi penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.⁵⁷ Tempat penelitian yang akan dilakukan ialah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan karena cakupan aktivitas *spin doctor* menyeluruh dalam wilayah Sulawesi Selatan sehingga peneliti tak bisa menentukan satu bagian wilayah kabupaten saja.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang di pergunakan penelitian dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.⁵⁸ Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan komunikasi politik.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini. Data primer dapat di peroleh

⁵⁷ S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Tarsinto, 1996), h.43

⁵⁸ Muliati Amin, *Dakwah Jamaah* (Disertasi) (Makassar,PPS. UIN Alauddin,2010), h.129

dari informan. Secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang kaya warna, detail dan komprehensif mengenai apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana. Adapun informan dalam penelitian yang akan dilakukan ialah tim pemenangan dan tim media center dari keseluruhan kandidat bakal calon gubernur Sulawesi Selatan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu metode tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga penulis memiliki metode yang jelas mengenai mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), merupakan melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji teori-teori yang ada.

2. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang mengharuskan penulis untuk turun lapangan atau objek penelitian guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan aktivitas *spin doctor*.

Proses pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu: observasi, dan *interview* atau wawancara, dengan menggunakan dua metode tersebut diharapkan penulis dapat memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap ketiga metode pengumpulan data tersebut, berikut akan di bahas secara singkat sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁹ Hal yang hendak di observasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini, bukan hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang di lakukan.

2. Wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.⁶⁰ Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan model *snow-ball* sampling yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti. Penelitian bekerjasama dengan informan, menentukan sampel berikutnya yang dianggap penting. Teknik penyampelan semacam ini menurut Frey ibarata bola salju yang menggelinding saja dalam menentukan subjek penelitian. Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh, yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian.⁶¹

⁵⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII: Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), h.70

⁶⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 82

⁶¹ Suwardi Endarsawara, *Penelitian Kebudayaan : Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi* (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), h. 116.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Baramoter keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi : observasi, dokumentasi, wawancara (*interview*) dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, camera, alat perekam, buku catatan, dan panduan penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.⁶²

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan : nilai kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu dalam memperoleh data tersebut penullis

⁶² Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Cet; III,Malang: UNISMUH Malang, 2005), h.15.

menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data yang dimaksud di sini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.⁶³ Reduksi diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.⁶⁴ Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan makna data pendukung.

3. Teknik analisis perbandingan (komparatif)

Dalam teknik penelitian ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi,

⁶³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Cet.VI:Bandung : Alfabeta, 2008), h.247

⁶⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 249

setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶⁵

⁶⁵ Sugiono, *Metologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

1. Sejarah Kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan sebelum Proklamasi Republik Indonesia, terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan yang berdiri sendiri dan didiami empat etnis yaitu : Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja.

Propinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan terbagi dalam 23 Kabupaten/Kotamadya serta 2 kota administratif yakni Palopo di Kabupaten Luwu dan Watampone di Kabupaten Bone. Sedangkan perubahan nama ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dari Makassar ke Ujung Pandang yang ditetapkan dalam PP nomor 51 tahun 1971 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1971.⁶⁶ Ketika Propinsi Sulawesi Selatan terbentuk, yang dipercayakan menjadi Gubernurnya yang pertama adalah Andi Abdul Rivai.⁶⁷

Periode Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sejak pengangkatan kepala daerah pertama oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno hingga saat ini, yaitu :

a. Gubernur Sulawesi

- 1) 1945 – 1949 DR. G. S. S. J. Ratoe Langie
- 2) 1950 – 1951 B. W. Lopian
- 3) 1951 – 1953 R. Sudiro
- 4) 1953 A. Burhanuddin
- 5) 1965 – 1956 Lanto Dg. Pasewang

⁶⁶ <http://www.sulsel.go.id>

⁶⁷ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, h. 1

- 6) 1956 – 1959 A. Pangerang Pettarani
- b. Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara
 - 1) 1959 – 1960 A. Pangerang Pettarani
 - 2) 1960 – 1964 A. A. Rivai
- c. Gubernur Sulawesi Selatan
 - 1) 1964 – 1966 A. A. Rivai
 - 2) 1966 – 1978 Ahmad Lamo (dua periode)
 - 3) 1978 – 1983 Andi Oddang
 - 4) 1983 – 1993 A. Amiruddin (dua periode)
 - 5) 1993 – 2003 H. Z. B. Palaguna (dua periode)
 - 6) 2003 – 2008 H. M. Amin Syam
 - 7) 2008 Ahmad Tanribali Lamo (pejabat gubernur sementara)
 - 8) 2008 – 2018 Syahrul Yasin Limpo

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, pemilihan kepala daerah masih menggunakan sistem perwakilan yakni kepala daerah hanya dipilih oleh perwakilan masyarakat di parlemen yang dikenal dengan sebutan Anggota Dewan.

Pada tahun 2007 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang

diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.⁶⁸ Sedangkan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pertama kali diadakan pada tahun 2008 yakni saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Tahun 2018 mendatang masyarakat Sulawesi Selatan kembali akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada serentak ini mencakup pemilihan Gubernur dan pilkada tingkat kabupaten/kota di beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini telah bermunculan beberapa bakal calon kandidat peserta pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, diantaranya dua pasangan telah mendapatkan rekomendasi dan surat tugas dari partai sebagai partai pengusung dan memenuhi syarat kursi pencalonan Gubernur serta telah melakukan deklarasi.

Empat pasangan calon yang dimaksud ialah, Nurdin Halid berpasangan dengan Aziz Kahar Muzakkar, Nurdin Abdullah berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman, Ichsan Yasin Limpo berpasangan dengan Andi Muzakkar, dan Agus Arifin Nu'mang dan Ahmad Tanribali Lamo. Mereka adalah tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda dan tidak semua merupakan tokoh politis. Berikut riwayat singkat kedua bakal calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023:

a. Daftar riwayat hidup Nurdin Halid

Nurdin Halid merupakan seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Ia lahir di Watampone pada tanggal 17 November 1958. Nurdin Halid menikah dengan Andi Nurbaeni dan memiliki 7 orang anak.

⁶⁸ “Sejarah Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA atau PEMILUKADA)” 28 Januari 2017 <https://kolomlisan.wordpress.com/2017/01/28/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-pilkada-atau-pemilukada/> (diakses 15 November 2017)

Beliau mulai menempuh pendidikan di SD Negeri Apala Watampone pada tahun 1964, selengkapnya berikut riwayat pendidikan dan karir organisasi Nurdin Halid :

- 1) 1964-1970 SD Negeri Apala Watampone
- 2) 1971-1973 SMEP Negeri Watampone
- 3) 1974-1976 SMEA Negeri Watampone
- 4) 1977-1982 IKIP Makassar (Jurusan Ekonomi perusahaan)

Karir organisasi Nurdin Halid :

- 1) 1983-1985 Pengurus KNPI Tingkat 1 Sulsel
- 2) 1984-1987 Pengurus KNPI Tingkat 1 Sulsel
- 3) 1985-1989 Pengurus AMPI Tingkat 1 Sulsel
- 4) 1988-1991 Pengurus Golkar Tingkat 1 Sulsel

b. Daftar riwayat hidup Aziz Kahar Muzakkar

Abdul Aziz Qahar Muzakkar merupakan senator asal Sulawesi Selatan, lahir di Palopo tanggal 15 Desember 1964. Aziz menikah dengan dan dikaruniai 8 orang anak.

Aziz Qahar Muzakkar memulai pendidikannya pada tahun 1970 di SD Negeri Padang-Padang, Luwu. Berikut riwayat pendidikannya:

- 1) SD Negeri Padang-Padang, Luwu (1970-1976)
- 2) SMP Negeri Bajo, Luwu (1976-1980)
- 3) SMA Negeri Belopa, Luwu (1980-1983)
- 4) S1 Universitas Hasanuddin (1983-1991)
- 5) S2 Universitas Hasanuddin (2004-2006)

Riwayat organisasi :

- 1) Ketua Umum HMI Cabang Ujung Pandang (1987-988)

- 2) Ketua Umum HMI Badko Intim (1990-1992)
- 3) Ketua Yayasan Al-Bayan (1990)
- 4) Koordinator Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar (1990- 1998)
- 5) Ketua Dewan Deplitbang DPP Hidayatullah (1998-2000)
- 6) Ketua Dewan Syuro Hidayatullah Pusat (2010-2012)
- 7) Pendiri Institute for Islamic Civilization Development (1998-2013)

Riwayat pekerjaan :

- 1) Pendiri dan pembina Yayasan Al-Bayan (1990-1998)
- 2) Pengajar/dosen Pesantren Hidayatullah Depok (1998-2013)
- 3) Anggota DPD RI (sampai sekarang)

c. Daftar riwayat hidup Nurdin Abdullah

Nurdin Abdullah lahir di kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 07 Februari 1963. Nurdin Abdullah menikah dengan Liestiaty Fahrudin pada tanggal 11 Januari 1986 dan telah dikaruniai satu anak perempuan dan dua anak laki-laki.

Nurdin Abdullah adalah Bupati pertama di Indonesia yang bergelar profesor. Ia menyelesaikan studi S1 di fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tahun 1986. Nurdin Abdullah menyelesaikan studi S2 *Master of Agriculture* dan S3 *Doktor of Agriculture* di Universitas yang sama. Sebelum berkecimpung di dunia politik, Ia dikenal sebagai seorang akademisi yang menempati beberapa jabatan struktural di Universitas maupun perusahaan. Ia pernah menjadi Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanuddin dan juga menjadi Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassar. Ia juga pernah menempati jabatan strategis di beberapa perusahaan yaitu menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Maruki Internasional Indonesia, Presiden Direktur di *Global Seafood Japan*, *Director of Kyushu Medical Co. Ltd. Japan*.

Tahun 2008 Nurdin Abdullah memilih dunia politik dan mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Bantaeng sebagai Bupati selama dua periode berturut-turut hingga tahun 2018.

d. Daftar riwayat hidup Andi Sudirman Sulaiman

Andi Sudirman Sulaiman lahir tanggal 25 September 1983, merupakan adik dari Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014–2019. Andi Sudirman Sulaiman merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara.

Andi Sudirman Sulaiman mengawali jenjang pendidikannya di SD Inpres 1073 Mappesangka, Bone (1989–1995), SLTP Negeri 1 (Ujung Lamuru) Lappariaja (1995–1998), dan SMU Negeri 1 Watampone (1998–2001). Pada tahun 2001, setamat sekolah SMA, Andi Sudirman melanjutkan studinya di Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan

Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Hasanuddin, Andi Sudirman langsung merambah dunia profesional. Ia pernah bekerja di beberapa perusahaan, diantaranya : PT. Thiess Indonesia, PT. Petrosea, dan PT. Offshore Service Indonesia.

e. Daftar riwayat hidup Ichsan Yasin Limpo

Ichsan Yasin Limpo lahir di Makassar, 9 Maret 1961 adalah mantan bupati Kabupaten Gowa, dia juga adalah adik kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Ichsan Yasin Limpo mengawali pendidikannya di SD dan SMP Jongaya tahun 1968-1976 (program 8 tahun), tahun 1981 ia lulus SMAK di Makassar, S1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan S2 Magister Hukum Pasca

Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Selain itu Ichsan memiliki pengalaman organisasi :

- 1) Basic Training HMI
- 2) *Leadership Transformation in Indonesia* di *Harvard Kennedy School* USA (2012)
- 3) Forum Tatap Muka Nasional KOSGORO
- 4) Penataran Kader Organisasi Nasional Khusus IX (TAKORNA) FKPPPI

Riwayat pekerjaan :

- 1) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1999-2005
 - 2) Bupati Gowa periode 2005-2015
- f. Daftar riwayat hidup Andi Muzakkar

Andi Muzakkar merupakan politisi yang mengawali karir politiknya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu pada tahun 1998. Pada tanggal 11 November 1964 Andi Muzakkar dilahirkan di Palopo.

Andi Muzakkar mengawali pendidikannya di SD DDI Palopo tahun 1977, SLTP Negeri 1 Palopo tahun 1980. Pada tahun 1989, Andi Muzakkar melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin jurusan Teknik Sipil dan tahun 2008 ia melanjutkan Masternya di UKI Paulus jurusan Ilmu Hukum.

Berikut riwayat pekerjaan Andi Muzakkar :

- 1) Direktur CV. Lona Kami (1998-1999)
- 2) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu (1999-2002)
- 3) Wakil Ketua DPRD Kota Palopo (2002-2004)
- 4) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu (2004-2009)
- 5) Bupati Luwu (2009-2014)

Riwayat organisasi Andi Muzakkar :

- 1) Ketua ICMi Luwu (2013 - 2018)
- 2) Ketua KONI Luwu (2010-2013)
- 3) Ketua DPD II Golkar Kabupaten Luwu (2010-2015)
- 4) Ketua FKPPi Luwu (2010-sekarang)
- 5) Pembina AMPI Luwu (2012-2017)
- 6) Pembina Kosgoro 1957 Luwu
- 7) Pembina AMPG (2010-2015)
- 8) Sekertaris Gapensi Palopo
- 9) Ketua HIPMI Luwu (1996-1999)
- 10) Wakil Sekertaris Pemuda Panca Marga Luwu (1998)
- 11) Ketua II Palopo Jeef Club (2006-2009)
- 12) Ketua Harian GASPA Palopo (2003-2004)
- 13) Sekertaris Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Hasanuddin (1985-1989)

g. Daftar riwayat hidup Agus Arifin Nu'mang

Agus Arifin Nu'mang merupakan seorang akademisi dan politisi lahir di Makassar pada tanggal 16 Agustus 1963. Agus Arifin Nu'mang mengawali karir politiknya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999. Jiwa politisi beliau mengalir dalam darahnya yang diwariskan oleh ayahnya yang juga merupakan pejabat daerah (mantan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang). Sebagai seorang akademisi ia pun memperistrikan seorang wanita akademisi juga, yaitu Majdah. Majdah adalah seorang akademisi telaten, saat ini ia menjabat sebagai Rektor di salah satu universitas swasta yang berada di Sulawesi Selatan. Hasil pernikahan Agus Arifin Nu'mang dengan Majdah dikaruniai 5 orang anak yaitu Qanisah Amaliah

Agus, Ahmad Rozadhi Agus, Ahmad Fauzan Agus, Amandah Amaliah Agus, Ahmad Syahrul Agus. Berikut riwayat pendidikan Agus Arifin Nu'mang :

- 1) SD Negeri Pangkajene Sidrap (Tamat tahun 1976)
- 2) SMP Negeri 6 Makassar (Tamat tahun 1979)
- 3) SMA Negeri 1 Makassar (Tamat tahun 1982)
- 4) Sosek Pertanian Unhas (Tamat tahun 1988)
- 5) Ekonomi Sumber Daya Agribisnis Unhas (Tamat tahun 1988)

Riwayat Pekerjaan :

- 1) Dosen Kopertis Wilayah IX
- 2) Rektor Universitas Islam Makassar
- 3) Dosen Fakultas Pertanian Unhas (Tamat 1988 – 2000)
- 4) Direktur CV. Raktelindo Merdeka
- 5) Komisaris PT. Rektelindo Mitratama
- 6) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (1999 – 2004)
- 7) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (2004 – 2008)
- 8) Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulsel (1999 – 2004)
- 9) Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel (2003 – 2004)
- 10) Penasihat Fraksi Partai Golkar
- 11) Ketua DPRD Provinsi Sulsel (2004 – 2008)
- 12) Wakil Gubernur Sulsel (2008 – 2013)
- 13) Wakil Gubernur Sulsel (2013-2018)

Riwayat Organisasi :

- 1) Wakil Ketua PD XIX FKPPi Sulawesi Selatan (1988 – 1994)
- 2) Sekretaris Dewan Penasehat PD XIXFKPPi Sulsel (1994 – 1998)
- 3) Wakil Ketua DPD KNPI TK.I Sulsel (1991 – 1994)

- 4) Anggota Dewan Paripurna DHD Angkatan 45 Sulsel (1993–1997)
- 5) Wakil Ketua DPD AMPI TK.I Sulsel (1993 – 1997)
- 6) Ketua Biro Pemenangan Pemilu DPD I.P Golkar (1993 – 1998)
- 7) Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel (1998 – 2004)
- 8) Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel (2004 – 2007)
- 9) Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel (2007 – 2009)
- 10) Ketua AMPG Provinsi Sulsel (2004 – 2009)
- 11) Ketua Pangda Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (Tahun 2003 – 2007)
- 12) Ketua WANHAT IPWI Provinsi Sulsel (2005 – 2008)
- 13) Ketua Ikatan Persaudraan Haji Indonesia Sulsel
- 14) Ketua PERCASI Provinsi Sulsel
- 15) Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Sulsel
- 16) Ketua Umum IKA Smansa Makassar
- 17) Ketua Umum Makassar Golf Club (MGC)
- 18) Ketua Depinda SOKSI Sulsel (Sekarang)
- 19) Ketua IOF Sulsel (Sekarang)

h. Daftar riwayat hidup Ahmad Tanribali Lamo

Ahmad Tanribali Lamo lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 November 1952. Ahmad Tanribali Lamo adalah mantan perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat. Saat masih menjadi perwira beliau sempat menjabat sebagai gubernur sementara di beberapa Provinsi, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan. Tanribali juga merupakan anak dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan Achmad Lamo. Berikut daftar riwayat pekerjaan Ahmad Tanribali Lamo :

- 1) Direktur Ajudan Jenderal TNI AD
- 2) Wakil Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Darat

- 3) Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2003)
- 4) Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan (2008)
- 5) Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa & Politik Kementerian Dalam Negeri RI (2009-sekarang)
- 6) Pejabat Gubernur Sulawesi Tengah (2011)
- 7) Pejabat Gubernur Papua Barat (2011-2012)
- 8) Pejabat Gubernur Maluku Utara (2013-2014)

2. Letak Geografi Provinsi Sulawesi Selatan

Propinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi pada posisi antara 0° 12' Lintang Utara dan 8° Lintang Selatan serta antara 116° 48'-122° 36' Bujur Timur.⁶⁹

Wilayah propinsi ini berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Selat Makassar di sebelah barat. Luas wilayah mencapai 6.248.254 hektare atau sekitar 42 persen dari luas Pulau Sulawesi dan 4,1 persen dari luas seluruh kepulauan Indonesia secara administratif dibagi dalam 23 daerah tingkat II yaitu Kabupaten Selayar dengan luas daratan adalah 903,35 kilometer persegi, Kabupaten Bulukumba seluas 1.154,67 kilometer persegi, Kabupaten Bantaeng dengan luas wilayahnya sekitar 395,83 kilometer persegi, Kabupaten Jeneponto seluas 737,64 kilometer persegi, Kabupaten Gowa dengan luas 1.883,33 kilometer persegi, Kabupaten Takalar dengan luas wilayahnya 566,51 kilometer persegi, Kabupaten Sinjai mempunyai luas wilayah 819,96 kilometer persegi, Kabupaten Bone seluas 4.559 kilometer persegi, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan luas wilayah 1.112,29 kilometer persegi, kabupaten Pinrang dengan wilayah seluas 1. 681,12 kilometer persegi, Kabupaten Barru mencakup

⁶⁹ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, h. 27

wilayah seluas 1.174,72 kilometer persegi, Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai luas wilayah 1. 883,30 kilometer persegi, Kabupaten Soppeng dengan wilayah seluas 1.500 kilometer persegi, Kabupaten wajo yang mempunyai luas sekitar 2.506,19 kilometer persegi, Kabupaten Maros mencakup luas 1. 619 kilometer persegi, Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 1. 786,02 kilometer persegi, Kabupaten Tana Toraja 3.205,80 kilometer persegi, Kabupaten Luwu dengan luas wilayah 17.791,43 kilometer persegi, Kabupaten Polmas dengan luas 4.781,53 kilometer persegi, Kabupaten mamuju memiliki luas wilayah lebih kurang 11.057,84 kilometer persegi, Kabupaten Majene 947,81 kilometer persegi, Kotamadya Ujung Pandang dengan luas wilayahnya 175,77 kilometer persegi dan Kotamadya Pare-Pare dengan luas wilayah 99,33 kilometer persegi.⁷⁰

Tanggal 5 Oktober 2004 Kabupaten Majene, Kabupaten Polmas dan Kabupaten Mamuju resmi berpisah dari bagian Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2004 dengan membentuk Provinsi baru yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan menjadikan Mamuju sebagai ibukota Provinsi. Sehingga data terbaru yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 menjadi 45.765 kilometer persegi dengan rincian dapat dilihat pada lampiran.

3. Demografi Provinsi Sulawesi Selatan

Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2015 penduduk Sulawesi Selatan berjumlah 8.520.304 jiwa yang tersebar di 24 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk terbesar 1.449.401 jiwa yang berada di Kota Makassar. Secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin.

⁷⁰ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, h. 27-29

Dari 8.520.304 jiwa jumlah penduduk Sulawesi Selatan, berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Sulawesi Selatan pada pemilihan presiden tahun diperoleh 6.323.711 jiwa dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan hasil pengecekan peneliti jumlah DPT tersebut adalah jumlah DPT terbaru Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan saat ini sebab survei data pemilih akan dilakukan pada bulan Januari 2018 nanti.

B. Aktivitas Spin Doctor Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan

Spin doctor memiliki peran penting dalam setiap pergantian kepemimpinan, baik itu kepala negara maupun kepala daerah. Mereka dengan keahliannya memainkan isu agar mampu menggalang opini positif publik dan memenangkan kandidat yang diusungnya. Sebagaimana pemilihan Gubernur tahun 2018 mendatang peneliti hanya terfokus pada dua pasangan bakal calon kandidat Gubernur Sulawesi Selatan yang nampaknya telah memiliki peluang besar maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dua diantaranya mendapatkan rekomendasi dan surat tugas dari beberapa partai. Kedua pasangan tersebut adalah Nurdin Halid berpasangan dengan Aziz Qahar Muzakkar dan Nurdin Abdullah berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman.

1. Aktivitas *Spin Doctor* Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Sulawesi Selatan

Nurdin Halid yang awalnya sempat kabarkan akan berpasangan dengan beberapa tokoh masyarakat Sulawesi Selatan salah satunya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, M. Roem. Setelah beberapa waktu akhirnya, ia memilih Aziz Qahar Muzakkar yang merupakan tokoh agama di Sulawesi Selatan. Adapun

kegiatan *spin doctor* Nurdin Halid menjelang pemilihan gubernur 2018 mendatang ialah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan kerja kader Partai Golkar dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Desa/Kelurahan

Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan memiliki hak dan wewenang untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi adalah kegiatan rutin Partai Golkar setiap kepengurusan baru dengan melakukan musyawarah daerah.

Pelaksanaan musyawarah ini dilakukan untuk merevitalisasi pengurus dengan memasukkan pengurus baru ke dalam struktur kepengurusan. Memaksimalkan kerja kader Partai Golkar dengan menggalang suara atau kader baru di setiap tingkatan kepengurusan. Adanya pengurus baru yang ikut menjadi kader Partai Golkar diharapkan mampu menambah suara bakal calon kandidat Partai Golkar pada setiap momentum politik.

Arfandy Idris selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantaeng sekaligus Wakil Ketua Koordinator GNH 17 Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan :

“Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali, semua struktur Partai Golkar di Indonesia itu akan dilakukan proses penataan kembali seluruh struktur organisasi kelembagaan Partai Golkar. Salah satunya melakukan pergantian pengurus karena seluruh Indonesia masa bakti kepengurusan Partai Golkar itu sudah berakhir satu tahun lebih. Maka DPP mengeluarkan kebijakan menyangkut pelaksana tugas di masing-masing Provinsi yang belum melakukan konsolidasi organisasi. Maka ditunjuklah Pak Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus menunjuk Pak Nurdin Halid membentuk kepengurusan DPD Partai Sulawesi Selatan. Dengan posisinya sebagai pelaksana tugas Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar mempererat basis dukungannya sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Karena Pak Nurdin ini, maka hasil konsolidasi tadi diperkuat dengan semua jajaran yang ada yaitu semua pimpinan desa sesulawesi selatan untuk meningkatkan basis supaya

lebih meluas maka untuk semua masyarakat yang ingin membantu dalam peningkatan elektabilitasnya melalui pembentukan relawan-relawan.”⁷¹

b. Mempromosikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan kandidat

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Nurdin Halid dan Aziz Qahar Muzakkar kini sering kita dapatkan di berbagai media lokal, baik itu cetak maupun elektronik, dapat dilihat pada lampiran. Promosi kegiatan sosialisasi ini adalah salahsatu bentuk kegiatan dalam memperkenalkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar yang diharapkan juga mampu meningkatkan elektabilitasnya.

c. Meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya

Pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar merupakan pasangan yang tak luput dari berita-berita negatif. Bahkan sejak awal menyatakan kesiapan diri untuk ikut serta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018 mendatang keduanya telah diserang dengan berita negatif.

Nurdin Halid misalnya isu pertama yang menyerangnya ialah mengenai persoalan hukum yang pernah menyeretnya ke penjara. Pemberitaan seperti ini tentu merugikan pihak Nurdin Halid karena dinilai mampu menurunkan elektabilitas pasangan bakal calon Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar. Hal ini tentu diperlukan keahlian *spin doctor* untuk meredam berita negatif menjadi positif. Menanggapi hal itu Nurdin melakukan jumpa pers untuk menenangkan pendukungnya.⁷²

Isu terbaru saat ini ialah setelah beberapa waktu Ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto ditahan KPK, dikabarkan bahwa Nurdin Halid diisukan belum pasti

⁷¹ Arfandy Idris (52 Tahun), Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantaeng sekaligus Wakil Ketua Koordinator GNH 17 Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 21 Oktober 2017

⁷² Didit Hariyadi, “Nurdin Halid Kena Kampanye Negatif Menjelang Pilgub Sulsel 2018”, <https://nasional.tempo.co/read/902478/nurdin-halid-kena-kampanye-negatif-menjelang-pilgub-sulsel-2018>, (diakses 5 Desember 2017)

maju bersama Aziz pada pemilihan gubernur 2018 mendatang sebab selain sibuk mengurus partai, ia juga dikabarkan bakal menjadi Menteri.⁷³

d. Menyusun *tagline*

Tagline adalah salahsatu penanda bagi seorang calon kepala daerah, karena memiliki ciri khas yang dianggap mewakili si calon. Adapun *tagline* pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar “Sama-Samaki Bangun Kampung” yang tentu memiliki makna. Arfandy Idris selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantaeng sekaligus Wakil Ketua Koordinator GNH 17 Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan :

“Ini harus sinergikan/disesuaikan dengan program pemerintah secara terpusat. Bukankah Presiden dalam nawacitanya salah satu itu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran? Pinggiran ini di interpretasi bahwa itu kampung. Makna untuk mengsinergikan program kabupaten atau kota dengan pemerintah provinsi maupun pusat, maka Pak Nurdin membuat sebuah tagline sama-samaki bangun kampung”.⁷⁴

Makna *tagline* “Sama-Samaki Bangun Kampung” menurut Muhammad Yusuf selaku Koordinator Media Center Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar ialah :

“Pak NH ini sudah lama tidak disini. Boleh dikata mereka ini tokoh nasional. Dia pulang mau membangun kampung. Titik krusialnya ini dimana orang yang sudah menikmati kebaikan pusat, semua itu ternyata dia lupakan dan pulang membangun kampung. Nah, pesan ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Kedua yakni sama-samaki. NH ingin menyampaikan kepada masyarakat SulSel di kembali ke sini membangun kampung dengan prinsip sama-samaki. Prinsip sama-samaki itu maksudnya membangun kolektifitas dalam pengambilan kebijakan dan menempatkan aspirasi dari bawah untuk menentukan kebijakan”.⁷⁵

⁷³ Hasim Arfah, “Nurdin Halid Mundur dari Pilgub Sulsel dan bakal Jadi Menteri? Ini Kata Ketua Bapilu Golkar”, <http://makassar.tribunnews.com/2017/11/02/nudin-halid-mundur-dari-pilgub-sulsel-dan-bakal-jadi-menteri-ini-kata-ketua-bapilu-golkar>, (diakses 5 Desember 2017)

⁷⁴ Arfandy Idris (52 Tahun), Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantaeng sekaligus Wakil Ketua Koordinator GNH 17 Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 21 Oktober 2017

⁷⁵ Muhammad Yusuf (40 Tahun), Koordinator Media Center NH-Aziz 22 Oktober 2017

e. Menyampaikan visi misi program prorakyat

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar memiliki visi dan misi yang bersinergi dengan *taglinenya* bersama membangun kampung dengan visi “Sulawesi Selatan maju, mandiri, sejahtera, dan religius” dengan misi sebagai berikut :

- 1) Membangun daerah berbasis trikarya : kemandirian ekonomi, kemartabatan rakyat serta keadilan sosial.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkarakter dan kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan.
- 5) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
- 6) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- 8) Memperkuat Sulawesi Selatan sebagai barometer dan pintu gerbang pembangunan di wilayah timur Indonesia dalam segala bidang.
- 9) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar di atas melahirkan 17 program unggulan yaitu :

- 1) Mencetak 100.000 wirausaha baru dan bantuan modal usaha untuk 500.000 usaha mikro tanpa agunan tanpa bunga.
- 2) Bantuan beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi pelajar SD – SMA.
- 3) Pemenuhan kebutuhan air bersih dan zat gizi pada tingkat rumah tangga untuk menurunkan jumlah angka orang sakit.
- 4) Penyediaan tenaga kesehatan masyarakat dan gizi pada tingkat desa / kelurahan.
- 5) Pelayanan kesehatan berbasis KTP dan pelayanan Puskesmas rawat inap 24 jam.
- 6) Rehabilitasi rumah rakyat miskin serta bantuan tunai untuk lansia dan penyandang cacat (disabilitas).
- 7) Peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru dan guru honorer.
- 8) Program satu kampung satu rumah Al-Qur'an dan peningkatan penghasilan Imam Desa.
- 9) Pembangunan jalan dan jembatan secara merata serta pembangunan jalan baru poros Makassar – Bone dan Makassar Bulukumba.
- 10) Pengembangan wisata bertaraf Internasional untuk destinasi wisata Toraja, Maros, Bulukumba dan Selayar.
- 11) Pembangunan lapangan sepak bola bertaraf Internasional di setiap Kecamatan.
- 12) Pembangunan irigasi terpadu, perwilayahan komoditas, dan pembukaan 100.000 hektar lahan pertanian baru.
- 13) Bantuan alat dan mesin pertanian, alat dan kapal penangkap ikan, serta menjamin ketersediaan pupuk bagi petani.
- 14) Pengembangan peternakan sapi rakyat, budi daya perikanan, dan perhutanan rakyat.
- 15) Bantuan beasiswa untuk 500 orang program doktor di bawah usia 35 tahun.
- 16) Pemberian insentif dan bantuan modal untuk usaha kreatif.

17) Peningkatan peran lembaga keuangan bank dan non-bank untuk mendukung koperasi, BUMDES dan UKM dalam mengembangkan usaha produktif dan investasi.

2. Aktivitas *spin doctor* Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Sulawesi Selatan

a. Mempromosikan keberhasilan kandidat sebagai Bupati Bantaeng

Spin doctor memiliki beberapa tugas, salah satunya ialah bertugas membangun citra positif bagi kandidatnya. Dalam membangun citra positif Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman *spin doctor* melakukan promosi mengenai keberhasilan Nurdin Abdullah sebagai Bupati dalam memperkenalkan dan menata kota Kabupaten Bantaeng dengan maksud memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Nurdin Abdullah mampu menata Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang telah dilakukannya di Kabupaten Bantaeng. Dengan kata lain, jika ia terpilih pada pemilihan gubernur 2018 mendatang maka pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan bercermin pada pembangunan Kabupaten Bantaeng.

b. Meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya

Tugas *spin doctor* selain membangun citra positif kandidatnya juga memberikan kesan negatif pada saingan politiknya. Berita negatif terhadap pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman tak dapat dipungkiri mampu meresahkan para pendukung maupun tim pemenangan. Hal ini tentu diperlukan keahlian *spin doctor* agar mampu mengantisipasi sesuatu yang diluar rencana. *Spin doctor* bertanggung jawab meredam isu itu dan mengubahnya menjadi isu positif.

Berita negatif terbaru yang tertuju kepada pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman ialah mengenai rekomendasi Partai Gerindra yang beralih ke Agus Arifin Nu'mang setelah Agus Arifin Nu'mang bertemu dengan Ketua Umum

Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada akhir bulan November kemarin. Berita ini segera direspon baik oleh *spin doctor* pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dengan melakukan klarifikasi di media salah satunya Celebes TV dengan menampilkan Staff Khusus Nurdin Abdullah yang juga tergabung dalam Tim Media Center Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, Bunyamin H Arsyad pada hari Jum'at, 1 Desember 2018.

Pada saat itu Bunyamin H Arsyad menyampaikan bahwa pertemuan Agus Arifin Nu'mang dengan Prabowo Subianto adalah pertemuan biasa antara pemerintah dan pimpinan partai dan rekomendasi Partai Gerindra telah resmi diberikan kepada pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dengan menampilkan surat rekomendasi yang dimaksud, dapat dilihat pada lampiran.

- c. Mencari pendamping yang mampu meningkatkan survei kandidat sekaligus memberi respon positif terhadap partai pengusung

Pasangan bakal calon Gubernur Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman merupakan pasangan yang telah melalui fase pergantian pasangan. Nurdin Abdullah awalnya telah menggandeng seorang mantan perwira tinggi yang juga merupakan anak mantan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakilnya yaitu, Ahmad Tanri Bali Lamo. Pasangan Nurdin Abdullah – Ahmad Tanri Bali Lamo yang dikenal dengan singkatan NH-TBL mulai terjalin sejak Desember 2015 lalu. Bahkan keduanya telah melakukan deklarasi pasangan beberapa bulan yang lalu. Sejak saat itu, baliho NA-TBL bermunculan di beberapa daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Bulan Maret kemarin pasangan NA-TBL di kabarkan akan segera melakukan deklarasi, paling lambat bulan Mei.

Dua tahun NA-TBL telah berkomitmen dan berjalan dengan harapan mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya agar mereka dilirik dan diusung oleh

partai. Nurdin Abdullah melalui hasil wawancara Tribun Timur mengakui perjuangan ini ternyata tak cukup meski telah ditunjang dengan karya dan prestasi keduanya.⁷⁶ Akhir september kemarin akhirnya telah diberitakan bahwa Nurdin Abdullah tak lagi berpasangan Ahmad Tanri Bali Lamo. Posisi Tanri Bali Lamo, kabarnya bakal digantikan oleh sejumlah figur. Beberapa diantaranya ialah Sudirman Sulaiman, adik kandung Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Aliyah Mustika Ilham (anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI), ada nama Andi Idris Manggabarani (Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel).

Pergantian calon Wakil Gubernur pendamping Nurdin Abdullah terjadi karena beberapa faktor berdasarkan hasil wawancara peneliti, diantaranya :

- a. Ketidakmampuan Ahmad Tanri Bali Lamo *melobby* partai

Rahman Rumaday selaku Ketua Deputy Jaringan PKS dan juga Sekertaris Jendral dalam Tim Relawan Pemuda NAC mengatakan :

“Salah satu penyebab pak Prof (Nurdin Abdullah) mengatikan Tanri Bali Lamo karena dia (Tanri Bali Lamo) tidak punya kemampuan *melobby* partai sehingga pak Prof yang turun langsung”.⁷⁷

- b. Dana

Bunjamin H. Arsyad selaku Staf khusus Bupati Bantaeng (Nurdin Abdullah) sekaligus anggota Tim Media Center NA-ASS mengatakan :

“Kan gini, misalnya kita udah ada 17 kursi. Tapi bagaimana nanti mekanisme pergerakan? Pergerakan ini harus dibiayai dengan uang, tidak cukup dengan

⁷⁶Abdul Azis Alimuddin, “Begini Kisah 'Cinta' NA dan Tanribali Lamo (1)”, *Tribun Timur*, 19 September 2017, <http://makassar.tribunnews.com/2017/09/19/begini-kisah-cinta-na-dan-tanribali-lampo-1>, (diakses 15 November 2017)

⁷⁷ Rahman Rumaday (31 tahun), Ketua Deputy Jaringan Partai Keadilan Sejahtera, *Wawancara*, Makassar 15 November 2017

partai saja. Kita lihat lagi bagaimana untuk membiayai pergerakan, sosialisasi dan kampanye. Partai memang yang minta tapi pak Tanri tidak mampu disitu”.⁷⁸

c. Wakil ditentukan oleh partai pengusung

Rahman Rumaday selaku Ketua Deputi Jaringan PKS dan juga Sekertaris Jendral dalam Tim Relawan Pemuda NAC mengatakan :

“Dalam penentuan calon Wakil Gubernur itu partai koalisi yg menentukan”.⁷⁹

d. Kesepakatan

Bunyamin H. Arsyad selaku Staf khusus Bupati Bantaeng (Nurdin Abdullah) sekaligus anggota Tim Media Center NA-ASS mengatakan :

“Bulan 6 kita melakukan survei, bulan 7 kita survei lagi. Setelah hasil survei bulan 7 keluar, kami melakukan pertemuan beberapa kali dengan pak Tanri Bali. Pak Prof (Nurdin Abdullah) bilang, ini hasil survei kita. Pak Tanri turun, kalau kita gabung tidak memungkinkan untuk menang, lebih baik kita berhenti. Pak Tanri bilang jangan pak Prof, pak Prof itu menjadi harapannya masyarakat. Pak Prof harus lanjut jangan jadikan saya sebagai penghalang biarlah pak Prof yang maju. Kesepakatan ini akhirnya dia bilang jangan pak Prof, mengenai saya awalnya kita mau mengabdikan, mengabdikan itu dimana saja dalam kapasitas apa saja”.⁸⁰

Kekurangan yang dimiliki Ahmad Tanri Bali Lamo ini menjadi kelebihan Andi Sudirman Sulaiman, ia mampu memenuhi semua hal itu :

a. *Lobby Partai*

Andi Sudirman Sulaiman merupakan adik kandung dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Amran Sulaiman sebagai seorang menteri tentunya memiliki hubungan baik dengan orang-orang pusat termasuk para petinggi partai. Hubungan inilah yang memudahkan Andi Sudirman Sulaiman untuk melobby partai dengan

⁷⁸ Bunyamin H. Arsyad (51 tahun), Anggota Tim Media Center NA-ASS, *Wawancara*, Makassar 24 Oktober 2017

⁷⁹ Rahman Rumaday (31 tahun), Ketua Deputi Jaringan Partai Keadilan Sejahtera, *Wawancara*, Makassar 15 November 2017

⁸⁰ Bunyamin H. Arsyad (51 tahun), Anggota Tim Media Center NA-ASS, *Wawancara*, Makassar 24 Oktober 2017

bantuan kakaknya. Hal ini diperjelas oleh Rahman Rumaday selaku Ketua Deputi Jaringan PKS dan juga Sekertaris Jendral dalam Tim Relawan Pemuda NAC mengatakan :

“Pak Prof turun langsung lobby partai. Pak Tanri tidak punya kemampuan disitu. Nah kelebihan nya pak Sudirman disitu, diakan kakaknya orang pusat sebagai menteri, dia yang bantu ini kan”.⁸¹

b. Dana

Pemilihan Kepala Daerah adalah ajang pesta demokrasi yang tentunya membutuhkan pembiayaan tak sedikit. Seorang calon pemimpin daerah dituntut tak hanya mengandalkan ketokohnya untuk mendapatkan dukungan partai dan memenangkan hati masyarakat agar memilihnya. Selain dari itu mereka juga harus memiliki dana, minimal cukup untuk membiayai sosialisasi dan kampanye. Namun sebagai orang yang tak memiliki partai atau dengan kata lain bukan kader partai dan ingin mencalonkan melalui pintu partai. Seorang calon pemimpin perlu persiapan dana lebih untuk sumbangan ke partai, sama halnya dengan pasangan NA-TBL. Ahmad Tari Bali Lamo tak mampu memenuhi permintaan partai. Bunyamin H. Arsyad selaku Staf khusus Bupati Bantaeng (Nurdin Abdullah) sekaligus anggota Tim Media Center NA-ASS mengatakan :

“Kita lihat lagi bagaimana dengan membiayai pergerakan sosialisasi dan kampanye. Partai memang yang minta, tapi pak Tanri tak mampu disitu. Itulah yang terjadi sehingga Pak Andi Sudirman Sulaiman terpilih”

c. Wakil ditentukan Partai pengusung

⁸¹ Rahman Rumaday (31 tahun), Ketua Deputi Jaringan Partai Keadilan Sejahtera, *Wawancara*, Makassar 15 November 2017

Pemilihan calon Wakil Gubernur yang akan mendampingi Nurdin Abdullah tidak hanya ditentukan oleh Nurdin Abdullah sendiri, melainkan melibatkan koalisi partai pengusung pula.

d. Kesepakatan

Berdasarkan kesepakatan partai pengusung yang memilih Andi Sudirman Sulaiman menjadi pendamping Nurdin Abdullah.

Pada tanggal 22 Oktober 2017 pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman melakukan deklarasi pasangan di Lapangan Karebosi Makassar. Beberapa hari setelah deklarasi, survei pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman meningkat secara signifikan dengan mengungguli pasangan calon kandidat lainnya. Berbeda dengan sebelumnya saat Nurdin Abdullah berpasangan dengan Ahmad Tanri Bali Lamo survei pasangan calon kandidat semakin redup (menurun), bahkan tak satupun rekomendasi partai mampu didapatkannya. Hal ini membuktikan bahwa Andi Sudirman Sulaiman adalah wakil yang mampu membantu meningkatkan survei pasangan calon kandidat Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman bila dibandingkan dengan pasangan calon kadidat sebelumnya, Nurdin Abdullah-Ahmad Tanri Bali Lamo.

Beberapa faktor yang disebutkan di atas menjadikan Andi Sudirman Sulaiman terpilih menjadi wakil Nurdin Abdullah, Andi Sudirman mampu memenuhi kekurangan yang dimiliki Ahmad Tanri Bali Lamo.

d. Menyusun *tagline*

Tagline kata yang mudah diingat dan digunakan oleh kelompok atau bisnis untuk menarik perhatian. *Tagline* banyak digunakan oleh bakal calon kandidat pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala negara maupun kepala daerah untuk memperkenalkan diri mereka dan mudah diingat masyarakat. Pasangan bakal calon

gubernur Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman memiliki *tagline* yang dikenal dengan “Maju Bersama Prof Andalan”. Tagline tersebut memiliki makna ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama mendukung pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam pemilihan gubernur 2018. Bunyamin H. Arsyad selaku Staf khusus Bupati Bantaeng (Nurdin Abdullah) sekaligus anggota Tim Media Center NA-ASS mengatakan :

“Itu dari relawan. Masing-masing relawan bikin. Minimal itu mereka menempatkan diri bagian dari Prof. Mereka mengajak kelompok relawan dan pemilih untuk bersama-sama Pak Prof. Kebersamaan itu bukan hanya pada pilkada tetapi juga setelah pilkada. Mereka merasa bagian dan Pak Prof menjadikan rakyat sebagai bagian yang menjadi satu kesatuan”.⁸²

e. Menyampaikan visi misi program kerakyatan

Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman sebagai bakal calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentu memiliki visi dan misi dalam menjalankan program kerjanya jika terpilih nanti. Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman memiliki visi “Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif dan berkarakter” dengan misi sebagai berikut :

- 1) Pemerintah yang berorientasi melayani, inovatif dan berkarakter.
- 2) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
- 3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
- 4) Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif
- 5) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan

Visi misi dapat diurai dengan merumuskan lima program unggulan yaitu

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan kelautan

⁸² Bunyamin H. Arsyad (51 Tahun), Anggota Tim Media Center NA-ASS, *Wawancara*, 28 November 2017

- 2) Meningkatkan jaringan perdagangan, industri dan pariwisata
 - 3) Memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu
 - 4) Penguatan kelembagaan pemerintah.
3. Aktivitas *Spin Doctor* Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar adalah satu-satunya pasangan yang ikut serta dalam pemilihan gubernur melalui jalur perseorangan atau lebih dikenal dengan istilah *independent*. Sebelumnya mereka mencoba menempuh jalur partai tetapi sampai masa pendaftaran pencalonan jalur *independent* tiba, partai yang didapatkannya belum mencukupi batas minimal kursi DPRD sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan KPU yakni 17 kursi.

Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar hanya memperoleh dukungan 11 kursi dari Partai Demokrat sementara partai politik lain telah memberikan rekomendasi kepada calon lainnya. Adapun kegiatan *Spin Doctor* Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan:

- a. Mempromosikan kelebihan dan kegiatan sosialisasi kandidat

Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar merupakan kombinasi pasangan yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, keduanya telah menjabat menjadi bupati 2 periode di 2 Kabupaten berbeda yang masing-masing memiliki jumlah pemilih tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ichsan Yasin Limpo adalah mantan Bupati di Kabupaten Gowa dan Andi Muzakkar adalah mantan Bupati di Kabupaten Luwu dengan berbekal pengalaman tersebut mereka dapat dikatakan telah memiliki lumbung suara atau lebih dikenal dengan istilah basis suara.

Ichsan Yasin Limpo juga memiliki kekuatan dari kerabat dekatnya yang sebagian besar merupakan pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, sebut saja saudaranya Syahrul Yasin Limpo yang merupakan Gubernur Sulawesi Selatan. Oleh karena itu *spin doctor* dalam aktivitas pengenalan kandidat tidak membutuhkan tenaga ekstra karena dengan pengalaman tersebut Ichsan Yasin Limpo dan Andi Muzakkar telah dikenal sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan. Namun demikian, *spin doctor* tetap harus bekerja maksimal dalam mensosialisasikan program unggulan pasangan yang dikenal dengan sinonim “*Punggawa Macakka*” yaitu memberikan kesejahteraan rakyat dengan mengedepankan kemanusiaan dan pendidikan.

b. Meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya

Spin doctor selain bertugas untuk meningkatkan citra positif kandidat yang diusungnya, ia juga bertugas untuk meredam berita negatif yang menyerang kandidat yang diusungnya. Hal demikianlah yang dilakukan oleh *spin doctor* pasangan yang populer dengan sebutan “*Punggawa Macakka*” ini. Meredam berita negatif mereka tidak serta merta melakukan konfirmasi secara langsung atau konferensi pers tetapi dengan cara mengekspos kegiatan sosialisasi dan kelebihan kandidatnya di berbagai media. Cara ini diharapkan mampu meredam berita atau isu negatif yang menyerang kandidat yang diusungnya karena tertimbun atau tertutupi oleh kegiatan-kegiatan positif yang dieksposnya.

c. Menyusun *tagline*

Tagline sebagai ciri khas pasangan calon merupakan sandi yang mudah diingat dan terdengar familiar di masyarakat khususnya para pemilik hak suara dalam pemilihan Gubernur 2018 mendatang. Adapun *tagline* pasangan Ichsan Yasin Limpo dengan Andi Muzakkar ialah “*Punggawa Macakka*”.

d. Menyampaikan visi misi program prorakyat

Setiap pasangan calon kandidat Gubernur memiliki visi misi program prorakyat, dengan visi “Sulawesi Selatan tumbuh inklusif, berdaya saing kuat dan lebih sejahtera”. Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar memiliki beberapa misi yaitu :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan
- 2) Mengoptimalkan potensi zona ekonomi produktif yang berdaya saing kuat dengan jejaring yang luas
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan interkoniktitas kawasan strategis secara berkelanjutan
- 4) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima
- 5) Memantapkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan nilai budaya masyarakat yang luhur

Berikut empat program unggulan yaitu:

- 1) Pendidikan berkualitas, merata tanpa pungutan
- 2) Rumah produktif untuk menciptakan lapangan kerja
- 3) Pembangunan yang merata untuk Sulawesi Selatan
- 4) Subsidi pendidikan 1,5 Triliun pertahun
4. Aktivitas *Spin Doctor* Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo
Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan

Agus Arifin Nu'mang adalah calon Gubernur dari petahana, sebelumnya ia menjabat sebagai wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mendampingi Syahrul Yasin Limpo selama 2 periode (2008-2018). Ahmad Tanribali Lamo sendiri

merupakan mantan perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat anak dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Lamo. Sebelumnya Ahmad Tanribali Lamo juga pernah menjabat sebagai Gubernur sementara pada tahun 2008.

Pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo adalah pasangan yang tak terduga sebelumnya. Tepatnya, setelah Ahmad Tanribali Lamo ditinggal Nurdin Abdullah dan Agus Arifin Nu'mang-Aliyah Mustika Ilham tak mampu memenuhi perolehan kursi minimum. Keduanya menyatakan sikap mendukung salah satu pasangan calon lainnya, bahkan turut hadir pada malam deklarasi yang dihadiri oleh beberapa pimpinan partai. Ketidakmungkinan itu semakin meyakinkan setelah partai PKB yang merupakan satu-satunya pendukung pasangan bakal calon Agus Arifin Nu'mang-Aliyah Mustika Ilham memberikan rekomendasi kepada calon lainnya. Namun berkat usaha dan kegigihan tim dan *spin doctor* Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo mereka berhasil mendapatkan rekomendasi partai pada detik-detik terakhir pendaftaran bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

- a. Mempromosikan keberhasilan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2018 dan kegiatan sosialisasi kandidat

Agus Arifin Nu'mang yang merupakan mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2018 memperkenalkan diri sebagai calon Gubernur periode selanjutnya dengan mempromosikan keberhasilan-keberhasilan yang dicapainya 10 tahun silam saat menjabat sebagai pemimpin daerah mendampingi Syahrul Yasin Limpo. Keberhasilan yang dimaksud berupa pembangunan dan peningkatan persentase perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir.

- b. Meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya

Spin doctor pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo memiliki tugas sebagaimana tugas *spin doctor* pada umumnya yaitu meningkatkan citra positif dan meredam berita negatif yang menyerang kandidat yang diusungnya. secara umum aktivitas *spin doctor* Agus-TBL mirip dengan aktivitas *spin doctor* pasangan yang lain dalam meredam berita negatif, mereka meredam dengan cara terus mengekspos hal-hal positif tentang pasangan yang diusung agar berita negatif yang tadinya muncul tertutupi dengan berita-berita positif terbaru.

c. Menyusun *tagline*

Pasangan Agus Arifin Nu'mang dengan Ahmad Tanribali Lamo menggunakan *tagline* atau tanda pengenalan dengan sebutan “Sulsel Bagus”. Adapun filosofi yang dimaksudkan ialah pembangunan Sulawesi Selatan pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

d. Menyampaikan visi misi program prorakyat

Program prorakyat pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo memiliki gagasan yang dikenal dengan istilah “Labuba Malabo”. Sepuluh tahun sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia. BPS mencatat, angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,6 persen selama sembilan tahun. Pencapaian yang begitu fantastis ini sudah cenderung memuncak. Jika salah mengambil kebijakan, perekonomian sulsel bisa turun. Karena itu, dibutuhkan perubahan landasan kebijakan pembangunan ke depan agar ekonomi sulsel bisa dipertahankan.

Pengwilayahan komoditas merupakan landasan kebijakan perekonomian yang telah membawa kemajuan Sulawesi Selatan sampai saat ini. Hal mana butuh dilakukan penyesuaian kebijakan pembangunan sesuai kondisi dan konteks kewenangan saat ini. Oleh karena itu, kami menawarkan landasan kebijakan

pembangunan melalui pendekatan pengembangan tiga kawasan di pegunungan dan dua kawasan di pesisir dan pulau-pulau. Konsep pengembangan kawasan ini kami beri nama labuba malabo. Labuba singkatan dari Latimojong, Bulusaraung dan Bawakaraeng. sementara malabo adalah selat makassar, laut flores, dan teluk bone. pengembangan kawasan labuba malabo akan mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan.

Labuba malabo akan mengurangi pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, dan melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat sulawesi selatan. Pemerataan akan dimulai dengan membangun 500 km jalan strategis provinsi. Jalan yang menghubungkan atau membangun konektivitas atas wilayah dan kawasan dalam wilayah labuba malabo yang masing-masing terdiri atas delapan kabupaten/kota. Jalan yang akan membuka akses lahan pertanian dan perkebunan baru antar dan lintas kawasan.

Labuba malabo adalah konsep pembangunan yang tidak hanya akan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. labuba malabo akan membangun dengan memperhatikan faktor ekologis dan masyarakat dalam kawasan tersebut. Pasangan Agus Arifin Nu'mang- Ahmad Tanribali Lamo merumuskan programnya unggulannya dalam konsep labuba malabo ini.

Adapun visi pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo ialah “Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang berkeadilan dan masyarakat yang berkeadaban” sedangkan misinya :

1. Menumbuhkan masyarakat yang berkeadaban : religius, toleran dan berkerukunan antar ummat beragama, dengan basis ilmu, iman dan amal
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan dan keharmonisan sosial serta kelestarian ekologis

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
4. Meningkatkan daya saing daerah dan mengsinergikan daya saing tersebut
5. Meningkatkan kualitas demokrasi, politik dan hukum
6. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih

C. *Strategi Spin Doctor Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Propinsi Sulawesi Selatan*

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Berikut strategi *spin doctor* Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Propinsi Sulawesi Selatan :

1. Mendekati Partai Politik

Pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar pada awalnya Partai Golkar adalah satu-satunya partai yang bersedia mengusung mereka, meski demikian kuota kursi di DPRD Provinsi telah memenuhi syarat minimal partai untuk mengusung bakal calon kandidat gubernurnya. Partai Golkar dapat dengan mudah diperolehnya dengan posisi Nurdin Halid sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar dan pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 15 September 2017 Partai Nasdem yang diperkirakan akan mengusung bacalon lain pun ikut bergabung dengan tim Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPW Sulawesi Selatan di Hotel Clarion Makassar.⁸³

⁸³ Yusran Uccang, "Nasdem-Golkar Berkoalisi Usung Nurdin Halid-Aziz di Pilkada Sulsel", *Kompas.com*, 15 September 2017. <http://regional.kompas.com/read/2017/09/15/05563661/nasdem-golkar-berkoalisi-usung-nurdinhalid-aziz-di-pilkada-sulsel>, (Diakses 05 November 2017)

Partai Nasdem tidak serta-merta berbelok arah dalam mengusung calonnya, namun telah terjadi komunikasi politik dan kesepakatan diantara para petinggi partai. Menurut analisa peneliti kesepakatan yang terjadi ialah Partai Nasdem memberikan rekomendasi kepada Ketua Harian Partai Golkar untuk mengusungnya di pemilihan Gubernur dan umpan baliknya Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada istri Ketua DPW Partai Nasdem untuk mengusungnya di pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebab dalam rentang waktu yang tak cukup lama setelah Partai Nasdem mengeluarkan SK rekomendasi kepada Nurdin Halid, Partai Golkar juga mengeluarkan SK rekomendasi kepada Fatmawati, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai PPP.

Pasangan Nurdin Halid – Aziz Kahar Makassar yang diusung Partai Golkar dan Partai Nasdem memiliki 25 total kursi di DPRD Provinsi dengan rincian 18 kursi dari Partai Golkar dan 7 kursi dari Partai Nasdem. 25 kursi ini bukan jumlah yang paten, sebab dukungan partai lain pun juga semakin bertambah. Selasa, tanggal 7 September 2017 kemarin Partai PKB pun turut memberikan dukungan politiknya kepada pasangan Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar yang sebelumnya telah menyatakan mengalihkan dukungan kepada bakal calon Gubernur lainnya, yaitu Agus Arifin Nu'mang dengan memberikan surat rekomendasi. Jika melihat dari perolehan kursi yang diterima, pasangan ini telah memenuhi syarat minimal kursi di DPRD untuk mendaftar di KPU sebagai calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 mendatang, yaitu 17 kursi.

Keberhasilan ini tak terlepas dari keahlian *spin doctor* meramu pesan agar dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Sehingga mampu meningkatkan survei popularitas dan elektabilitas bakal calon kandidat yang diusungnya. Perlu kita ketahui bahwa popularitas dan elektabilitas adalah salah satu faktor yang cukup

diperhatikan partai politik sebelum menentukan bakal calon kandidat yang diusungnya.

2. Menjaga Partai Pengusung supaya Tidak Mengalihkan Dukungannya

Sebelum pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dibuka secara resmi. Para calon masih merasa khawatir karena rekomendasi partai yang menjadi pegangannya juga masih memiliki peluang untuk mengalihkan dukungannya ke kandidat lain. Oleh karena itu selain memiliki strategi mendekati partai politik juga dituntut memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan partai politik agar tak mengalihkan dukungannya. Selain itu elektabilitas dan popularitas bakal calon harus tetap di kontrol agar tidak menurun.

Keberhasilan tim Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam mendapatkan dukungan partai politik tak terlepas dari peranan penting *spin doctor* dalam meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya, berikut strategi yang digunakan *spin doctor* Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman :

1. Mendekati Partai Politik

Pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman bila melihat latar belakang keduanya, tak ada yang memiliki *background* sebagai kader partai politik. Meskipun demikian mereka telah memperoleh rekomendasi dari 4 partai politik. Rilman Abdullah selaku Tim Operasional Nurdin Abdullah mengatakan :

“Rekomendasi partai saat ini ada empat yaitu PKS, PAN, Gerindra dan PDIP, tapi masih ada satu partai dalam status menunggu”.⁸⁴

Tanggal 22 Oktober 2017 pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman melakukan deklarasi di Lapangan Karebosi Makassar dirangkaikan dengan

⁸⁴ Rilman Abdullah (47 Tahun), Tim Operasional Tim Nurdin Abdullah, *Wawancara*, Makassar 20 Oktober 2017

kegiatan jalan santai dan dihadiri oleh partai pengusung dan ribuan partisipan, lihat pada lampiran.

Setiap partai memiliki pemikiran dan pertimbangan yang berbeda untuk mengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, diantaranya :

a. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Tajuddin selaku Staf Ahli Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan :

“Setiap partai memiliki pemikiran dan pertimbangan yang berbeda, sama halnya dengan Gerindra juga memiliki indikator-indikator tertentu untuk mengusung seseorang. Kami melihat pak Nurdin Abdullah memiliki *tradecor* yang bagus dengan poin: elektabilitas, ketokohan dan *poltrack*. Yang intinya menuju kepada kemaslahatan dan memang ada hal-hal bersifat politik yang menjadi pertimbangan khusus.”⁸⁵

Tajuddin secara tidak langsung mengakui Andi Sudirman Sulaiman memiliki pengaruh dalam pengusungan Gerindra terhadap pasangan NA-ASS. Tajuddin mengatakan :

“yang jelas kehadiran beliau (Andi Sudirman Sulaiman) itu membawa warna baru di percaturan politik terutama untuk Sulawesi Selatan”.⁸⁶

b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Busman Muin selaku Departemen Internal PDIP Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan :

“Ada beberapa faktor mengapa PDIP mengusung NA-ASS dengan melihat : elektabilitas, ketokohan dan tes. Internal (PDIP) melakukan seleksi dengan

⁸⁵ Tajuddin (42 Tahun), Staff Ahli Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar 6 November 2017

⁸⁶ Tajuddin (42 Tahun), Staff Ahli Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar 6 November 2017

beberapa kali tahapan dan mekanisme panjang. Pada akhirnya nanti dari semua calon yang mendaftar tertinggi itu adalah Pak Nurdin Abdullah”.⁸⁷

Berbeda dengan Gerindra yang menyatakan Andi Sudirman Sulaiman berpengaruh dalam menentukan usungannya, Busman Muin mengatakan :

“Kita tidak mencampuri siapa yang digandeng, itu kan internal pak Nurdin Abdullah sendiri. Kan begini, pendaftaran itu kan Gubernur bukan Wakil Gubernur. Kita hanya terfokus pada Gubernurnya saja”.⁸⁸

c. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Rahman Rumaday selaku Ketua Deputy Jaringan PKS dan juga Sekretaris Jendral dalam Tim Relawan Pemuda NAC mengatakan :

“Sejak awalkan PKS mendukung pak Prof di Bantaeng pada periode pertamanya. Bahkan sejak berpasangan dengan Pak Tanri Bali PKS sudah mendukung hanya belum dimunculkan. Kita kalah cepat menginformasikan oleh PDIP, apalagi dia menggunakan media TV. Di PKS itu kan setiap tahun ada kemah untuk kader. Salah satu bentuk dukungannya itu persiapan kemah nanti untuk menggerakkan kader. Pas momennya ini kita coba hadirkan Pak Prof”.⁸⁹

d. Partai Amanat Nasional (PAN)

Pada pelaksanaan deklarasi NA-ASS peneliti turut hadir menyaksikan langsung. Namun PAN sebagai partai pengusung hanya diwakilkan oleh Mantan Ketua DPD Makassar, selain itu tak satupun pengurus wilayah terlihat saat itu. Menurut analisa peneliti ada ketidaksesuaian pendapat antara pengurus pusat dan pengurus wilayah. Ketidaksesuaian dimaksudkan adalah keinginan pengurus pusat dalam menentukan calon kandidat Gubernur yang diusungnya tidak sama dengan calon kandidat Gubernur yang ingin diusung pengurus wilayah (orang yang berbeda).

⁸⁷ Busman Muin (50 Tahun), Departemen Internal PDIP Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar 10 November 2017

⁸⁸ Busman Muin (50 Tahun), Departemen Internal PDIP Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar 10 November 2017

⁸⁹ Rahman Rumaday (31 tahun), Ketua Deputy Jaringan Partai Keadilan Sejahtera, *Wawancara*, Makassar 15 November 2017

Beberapa waktu setelah deklarasi peneliti mencoba menghubungi pengurus DPW PAN untuk mengkonfirmasi mengenai dukungan dan ketidakhadiran pengurus wilayah PAN Sulawesi Selatan. Namun mereka enggan memberikan keterangan.

Hal ini pulalah yang menguatkan analisa peneliti bahwa calon kandidat Gubernur hanya ditentukan oleh pengurus pusat dan semua kader, baik itu itu pengurus wilayah sampai pengurus tingkat desa/kelurahan harus mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Keharusan inilah yang coba dilawan oleh pengurus wilayah PAN dengan ketidakhadirannya di acara deklarasi.

Pengurus DPW PAN yang awalnya diberitakan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar yang juga merupakan bakal calon Kandidat Gubernur kini diharuskan mengalihkan dukungan ke Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Kuat dugaan peneliti pengurus DPW PAN terbagi menjadi dua kubu.

2. Menjaga Partai Pengusung supaya Tidak Mengalihkan Dukungannya

Sebelum pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dibuka secara resmi. Para calon masih merasa khawatir karena rekomendasi partai yang menjadi pegangannya juga masih memiliki peluang untuk mengalihkan dukungannya ke kandidat lain. Oleh karena itu selain memiliki strategi mendekati partai politik juga dituntut memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan partai politik agar tak mengalihkan dukungannya. Selain itu elektabilitas dan popularitas bakal calon harus tetap di kontrol agar tidak menurun.

Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar sebagai satu-satunya pasangan calon yang berhasil menempuh jalur *independent* atau yang dikenal dengan pengajuan calon tanpa melalui jalur partai melainkan dengan pernyataan dukungan masyarakat yang jumlah minimalnya telah ditentukan oleh KPU sebagai

penyelenggara pemilihan umum kepala daerah. Kendati demikian pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar pada awalnya mencoba melalui jalur partai politik juga sama dengan pasangan calon yang lainnya dengan cara :

1. Mendekati Partai Politik

Pendekatan partai politik adalah langkah awal yang dilakukan pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar dengan melakukan komunikasi awal kepada semua partai politik. Lobby partai terus dilakukan dengan memperoleh dukungan beberapa partai yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Berkarya. Meskipun memperoleh tiga partai, namun semua itu tidak cukup memenuhi standar minimal perolehan kursi untuk mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur.

2. Menjaga Partai Pengusung supaya Tidak Mengalihkan Dukungannya

Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar tetap menjaga partai yang telah memberikan dukungan kepadanya dengan melakukan komunikasi intensif dan kepercayaan bahwa mereka akan tetap mampu mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Tak hanya itu popularitas dan elektabilitasnya harus tetap terjaga agar tak menurun sehingga membuat partai pengusungnya mengalihkan dukungan kepada pasangan calon lain.

Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo adalah pasangan yang tak terduga sebelumnya mampu mendaftarkan dirinya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Terlebih setelah Agus Arifin Nu'mang gagal memperoleh dukungan partai saat akan berpasangan dengan Aliyah Mustika dan Ahmad Tanribali Lamo sendiri ditinggalkan Nurdin Abdullah menggantikannya dengan Andi Sudirman Sulaiman. hal ini diperkuat pula saat keduanya menghadiri deklarasi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur

lainnya, yaitu Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar. Langkah cepat yang dilakukan pasangan calon Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo ialah :

1. Mendekati Partai Politik

Pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo melakukan pendekatan kepada partai politik secara diam-diam dan terhitung cepat. Sebab butuh waktu sebulan untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi partai. Dalam waktu singkat itu pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo mampu mengalihkan dukungan Partai Gerakan Indonesia Raya yang awalnya mendukung pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Dukungan Partai Gerakan Indonesia Raya diperolehnya dengan melakukan komunikasi dan lobby kepada ketua umum partai secara langsung dan pemberian rekomendasi tersebut ditanda tangani langsung pula oleh ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto. Hal ini dapat kita lihat pada lampiran di belakang.

Dukungan partai yang diperoleh selama sebulan sebanyak tiga dengan jumlah kursi sebanyak 19, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya 11 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 7 kursi dan Partai Bulan Bintang 1 kursi. Perolehan 19 kursi telah memenuhi batas minimal perolehan kursi yang ditetapkan KPU sehingga pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018.

2. Menjaga Partai Pengusung supaya Tidak Mengalihkan Dukungannya

Menjelang beberapa hari sebelum pendaftaran pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo berhasil mendapatkan rekomendasi partai. Namun waktu beberapa hari itu rawan terjadinya pengalihan dukungan partai politik ke pasangan lainnya. Hal ini tentu memerlukan strategi dan komunikasi yang baik agar

partai pengusung tak mengalihkan dukungan dengan menjaga elektabilitas pasangannya agar tetap atau meningkat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

1. Sejarah Kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan

Sejak 30.000 tahun silam pulau Sulawesi telah dihuni oleh manusia. Penemuan tertua ditemukan di gua-gua dekat bukit kapur dekat Maros, sekitar 30 km sebelah timur laut dan Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.

Sulawesi Selatan sebelum Proklamasi Republik Indonesia, terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan yang berdiri sendiri dan didiami empat etnis yaitu : Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Ada tiga kerajaan besar yang berpengaruh luas yaitu Luwu, Gowa dan Bone yang pada abad ke XVI dan XVII mencapai kejayaannya dan telah melakukan hubungan dagang serta persahabatan dengan bangsa Eropa, India, Cina, Melayu dan Arab. Selain ketiga kerajaan besar terdapat pula sejumlah kerajaan kecil yang beraliansi dengan kerajaan besar, namun tetap bertahan secara otonom.

Pembentukan Propinsi Sulawesi Selatan berbeda dengan Propinsi lain di Indonesia, Sulawesi Selatan terbentuk menjadi satu kesatuan wilayah administratif tingkat propinsi, atas kemauan dan ikrar raja-raja serta masyarakat setempat sekaligus bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Sulawesi Selatan menjadi salah satu propinsi di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 21 tahun 1950 dan Makassar sebagai pusat pemerintahan.

Mengacu pada UU Nomor 21 tahun 1950 maka wilayah administrasi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 daerah swantantra tingkat II dan 2 kotapraja yakni Makassar dan Parepare. Status propinsi administrasi Sulawesi berakhir pada

tahun 1960 yang ditetapkan dengan UU Nomor 47 tahun 1960 dan secara otonom membagi Sulawesi menjadi Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara beribukota Makassar dan Propinsi Sulawesi Utara-Tengah beribukota Manado.

Empat tahun kemudian pemisahan wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara ditetapkan dalam II Nomor 13 tahun 1964 dan Sulawesi Selatan resmi menjadi daerah otonom dan terus disempurnakan dengan ditetapkannya UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang menggabungkan wilayah administratif daerah-daerah otonom dalam satu penyebutan yaitu Daerah Tingkat II atau Kotamadya dan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Propinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan terbagi dalam 23 Kabupaten/Kotamadya serta 2 kota administratif yakni Palopo di Kabupaten Luwu dan Watampone di Kabupaten Bone. Sedangkan perubahan nama ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dari Makassar ke Ujung Pandang yang ditetapkan dalam PP nomor 51 tahun 1971 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1971.¹ Ketika Propinsi Sulawesi Selatan terbentuk, yang dipercayakan menjadi Gubernurnya yang pertama adalah Andi Abdul Rivai.²

Periode Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sejak pengangkatan kepala daerah pertama oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno hingga saat ini, yaitu :

a. Gubernur Sulawesi

- 1) 1945 – 1949 DR. G. S. S. J. Ratoe Langie
- 2) 1950 – 1951 B. W. Lopian
- 3) 1951 – 1953 R. Sudiro
- 4) 1953 A. Burhanuddin

¹ <http://www.sulsel.go.id>

² Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, h. 1

- 5) 1965 – 1956 Lanto Dg. Pasewang
- 6) 1956 – 1959 A. Pangerang Pettarani
- b. Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara
 - 1) 1959 – 1960 A. Pangerang Pettarani
 - 2) 1960 – 1964 A. A. Rivai
- c. Gubernur Sulawesi Selatan
 - 1) 1964 – 1966 A. A. Rivai
 - 2) 1966 – 1978 Ahmad Lamo (dua periode)
 - 3) 1978 – 1983 Andi Oddang
 - 4) 1983 – 1993 A. Amiruddin (dua periode)
 - 5) 1993 – 2003 H. Z. B. Palaguna (dua periode)
 - 6) 2003 – 2008 H. M. Amin Syam
 - 7) 2008 Ahmad Tanribali Lamo (pejabat gubernur sementara)
 - 8) 2008 – 2018 Syahrul Yasin Limpo

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, pemilihan kepala daerah masih menggunakan sistem perwakilan yakni kepala daerah hanya dipilih oleh perwakilan masyarakat di parlemen yang dikenal dengan sebutan Anggota Dewan.

Pada tahun 2007 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.³

Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pertama kali diadakan pada tahun 2008 yakni saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. 2018 mendatang masyarakat Sulawesi Selatan kembali akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada serentak ini mencakup pemilihan Gubernur dan pilkada tingkat kabupaten/kota di beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini telah bermunculan beberapa bakal calon kandidat peserta pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, diantaranya dua pasangan telah mendapatkan rekomendasi dan surat tugas dari partai sebagai partai pengusung dan memenuhi syarat kursi pencalonan Gubernur serta telah melakukan deklarasi. Sementara itu, ada satu pasangan bakal calon memiliki kemungkinan akan mencalonkan diri melalui jalur perseorangan yang dikenal dengan istilah *independent*.

Empat pasangan calon yang dimaksud ialah, Nurdin Halid berpasangan dengan Aziz Kahar Muzakkar, Nurdin Abdullah berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman, Ichsan Yasin Limpo berpasangan dengan Andi Muzakkar, dan Agus Arifin Nu'mang dan Ahmad Tanribali Lamo. Mereka adalah tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda dan tidak semua merupakan tokoh politis. Berikut riwayat singkat kedua bakal calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023:

a. Daftar riwayat hidup Nurdin Halid

³ “Sejarah Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA atau PEMILUKADA)” 28 Januari 2017 <https://kolomlisan.wordpress.com/2017/01/28/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-pilkada-atau-pemilukada/> (diakses 15 November 2017)

Nurdin Halid merupakan seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Ia lahir di Watampone pada tanggal 17 November 1958. Nurdin Halid menikah dengan Andi Nurbaeni dan memiliki 7 orang anak.

Beliau mulai menempuh pendidikan di SD Negeri Apala Watampone pada tahun 1964, selengkapnya berikut riwayat pendidikan dan karir organisasi Nurdin Halid :

- 1) 1964-1970 SD Negeri Apala Watampone
- 2) 1971-1973 SMEP Negeri Watampone
- 3) 1974-1976 SMEA Negeri Watampone
- 4) 1977-1982 IKIP Makassar (Jurusan Ekonomi perusahaan)

Karir organisasi Nurdin Halid :

- 1) 1983-1985 Pengurus KNPI Tingkat 1 Sulsel
- 2) 1984-1987 Pengurus KNPI Tingkat 1 Sulsel
- 3) 1985-1989 Pengurus AMPI Tingkat 1 Sulsel
- 4) 1988-1991 Pengurus Golkar Tingkat 1 Sulsel

b. Daftar riwayat hidup Aziz Kahar Muzakkar

Abdul Aziz Qahar Muzakkar merupakan senator asal Sulawesi Selatan, lahir di Palopo tanggal 15 Desember 1964. Aziz menikah dengan dan dikaruniai 8 orang anak.

Aziz Qahar Muzakkar memulai pendidikannya pada tahun 1970 di SD Negeri Padang-Padang, Luwu. Berikut riwayat pendidikannya:

- 1) SD Negeri Padang-Padang, Luwu (1970-1976)
- 2) SMP Negeri Bajo, Luwu (1976-1980)
- 3) SMA Negeri Belopa, Luwu (1980-1983)
- 4) S1 Universitas Hasanuddin (1983-1991)

5) S2 Universitas Hasanuddin (2004-2006)

Riwayat organisasi :

- 1) Ketua Umum HMI Cabang Ujung Pandang (1987-988)
- 2) Ketua Umum HMI Badko Intim (1990-1992)
- 3) Ketua Yayasan Al-Bayan (1990)
- 4) Koordinator Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar (1990- 1998)
- 5) Ketua Dewan Deplitbang DPP Hidayatullah (1998-2000)
- 6) Ketua Dewan Syuro Hidayatullah Pusat (2010-2012)
- 7) Pendiri Institute for Islamic Civilization Development (1998-2013)

Riwayat pekerjaan :

- 1) Pendiri dan pembina Yayasan Al-Bayan (1990-1998)
- 2) Pengajar/dosen Pesantren Hidayatullah Depok (1998-2013)
- 3) Anggota DPD RI (sampai sekarang)

c. Daftar riwayat hidup Nurdin Abdullah

Nurdin Abdullah lahir di kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 07 Februari 1963. Nurdin Abdullah menikah dengan Liestiaty Fahrudin pada tanggal 11 Januari 1986 dan telah dikaruniai satu anak perempuan dan dua anak laki-laki.

Nurdin Abdullah adalah Bupati pertama di Indonesia yang bergelar profesor. Ia menyelesaikan studi S1 di fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin pada tahun 1986. Nurdin Abdullah menyelesaikan studi S2 *Master of Agriculture* dan S3 *Doktor of Agriculture* di Universitas yang sama. Sebelum berkecimpung di dunia politik, Ia dikenal sebagai seorang akademisi yang menempati beberapa jabatan struktural di Universitas maupun perusahaan. Ia pernah menjadi Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanuddin dan juga menjadi Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassar. Ia juga pernah menempati

jabatan strategis di beberapa perusahaan yaitu menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Maruki Internasional Indonesia, Presiden Direktur di *Global Seafood Japan*, *Director of Kyushu Medical Co. Ltd. Japan*.

Tahun 2008 Nurdin Abdullah memilih dunia politik dan mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Bantaeng sebagai Bupati selama dua periode berturut-turut hingga tahun 2018.

d. Daftar riwayat hidup Andi Sudirman Sulaiman

Andi Sudirman Sulaiman lahir tanggal 25 September 1983, merupakan adik dari Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014–2019. Andi Sudirman Sulaiman merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara.

Andi Sudirman Sulaiman mengawali jenjang pendidikannya di SD Inpres 10 73 Mappesangka, Bone (1989–1995), SLTP Negeri 1 (Ujung Lamuru) Lappariaja (1995–1998), dan SMU Negeri 1 Watampone (1998–2001). Pada tahun 2001, setamat sekolah SMA, Andi Sudirman melanjutkan studinya di Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan

Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Hasanuddin, Andi sudirman langsung merambah dunia profesional. Ia pernah bekerja di beberapa perusahaan, diantaranya : PT. Thiess Indonesia, PT. Petrosea, dan PT. Offshore Service Indonesia.

e. Daftar riwayat hidup Ichsan Yasin Limpo

Ichsan Yasin Limpo lahir di Makassar, 9 Maret 1961 adalah mantan bupati Kabupaten Gowa, dia juga adalah adik kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Ichsan Yasin Limpo mengawali pendidikannya di SD dan SMP Jongaya tahun 1968-1976 (program 8 tahun), tahun 1981 ia lulus SMAK di Makassar, S1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan S2 Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Selain itu Ichsan memiliki pengalaman organisasi :

- 1) Basic Training HMI
- 2) *Leadership Transformation in Indonesia* di *Harvard Kennedy School* USA (2012)
- 3) Forum Tatap Muka Nasional KOSGORO
- 4) Penataran Kader Organisasi Nasional Khusus IX (TAKORNA) FKPPPI

Riwayat pekerjaan :

- 1) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1999-2005
 - 2) Bupati Gowa periode 2005-2015
- f. Daftar riwayat hidup Andi Muzakkar

Andi Muzakkar merupakan politisi yang mengawali karir politiknya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu pada tahun 1998. Pada tanggal 11 November 1964 Andi Muzakkar dilahirkan di Palopo.

Andi Muzakkar mengawali pendidikannya di SD DDI Palopo tahun 1977, SLTP Negeri 1 Palopo tahun 1980. Pada tahun 1989, Andi Muzakkar melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin jurusan Teknik Sipil dan tahun 2008 ia melanjutkan Masternya di UKI Paulus jurusan Ilmu Hukum.

Berikut riwayat pekerjaan Andi Muzakkar :

- 1) Direktur CV. Lona Kami (1998-1999)
- 2) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu (1999-2002)
- 3) Wakil Ketua DPRD Kota Palopo (2002-2004)

4) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu (2004-2009)

5) Bupati Luwu (2009-2014)

Riwayat organisasi Andi Muzakkar :

1) Ketua ICMI Luwu (2013 - 2018)

2) Ketua KONI Luwu (2010-2013)

3) Ketua DPD II Golkar Kabupaten Luwu (2010-2015)

4) Ketua FKPPi Luwu (2010-sekarang)

5) Pembina AMPI Luwu (2012-2017)

6) Pembina Kosgoro 1957 Luwu

7) Pembina AMPG (2010-2015)

8) Sekertaris Gapensi Palopo

9) Ketua HIPMI Luwu (1996-1999)

10) Wakil Sekertaris Pemuda Panca Marga Luwu (1998)

11) Ketua II Palopo Jeef Club (2006-2009)

12) Ketua Harian GASPA Palopo (2003-2004)

13) Sekertaris Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Hasanuddin (1985-1989)

g. Daftar riwayat hidup Agus Arifin Nu'mang

Agus Arifin Nu'mang merupakan seorang akademisi dan politisi lahir di Makassar pada tanggal 16 Agustus 1963. Agus Arifin Nu'mang mengawali karir politiknya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999. Jiwa politisi beliau mengalir dalam darahnya yang diwariskan oleh ayahnya yang juga merupakan pejabat daerah (mantan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang). Sebagai seorang akademisi ia pun memperistrikan seorang wanita akademisi juga, yaitu Majdah. Majdah adalah seorang akademisi telaten, saat ini ia menjabat sebagai Rektor di salah satu universitas swasta yang berada di Sulawesi Selatan. Hasil pernikahan agus

Arifin Nu'mang dengan Majdah dikaruniai 5 orang anak yaitu Qanisah Amaliah Agus, Ahmad Rozadhi Agus, Ahmad Fauzan Agus, Amandah Amaliah Agus, Ahmad Syahrul Agus. Berikut riwayat pendidikan Agus Arifin Nu'mang :

- 1) SD Negeri Pangkajene Sidrap (Tamat tahun 1976)
- 2) SMP Negeri 6 Makssar (Tamat tahun 1979)
- 3) SMA Negeri 1 Makassar (Tamat tahun 1982)
- 4) Sosek Pertanian Unhas (Tamat tahun 1988)
- 5) Ekonomi Sumber Daya Agribisnis Unhas (Tamat tahun 1988)

Riwayat Pekerjaan :

- 1) Dosen Kopertis Wilayah IX
- 2) Rektor Universitas Islam Makassar
- 3) Dosen Fakultas Pertanian Unhas (Tamat 1988 – 2000)
- 4) Direktur CV. Raktelindo Merdeka
- 5) Komisaris PT. Rektelindo Mitratama
- 6) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (1999 – 2004)
- 7) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (2004 – 2008)
- 8) Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulsel (1999 – 2004)
- 9) Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel (2003 – 2004)
- 10) Penasihat Fraksi Partai Golkar
- 11) Ketua DPRD Provinsi Sulsel (2004 – 2008)
- 12) Wakil Gubernur Sulsel (2008 – 2013)
- 13) Wakil Gubernur Sulsel (2013-2018)

Riwayat Organisasi :

- 1) Wakil Ketua PD XIX FKPPi Sulawesi Selatan (1988 – 1994)
- 2) Sekretaris Dewan Penasehat PD XIXFKPPi Sulsel (1994 – 1998)

- 3) Wakil Ketua DPD KNPI TK.I Sulsel (1991 – 1994)
- 4) Anggota Dewan Paripurna DHD Angkatan 45 Sulsel (1993–1997)
- 5) Wakil Ketua DPD AMPI TK.I Sulsel (1993 – 1997)
- 6) Ketua Biro Pemenangan Pemilu DPD I.P Golkar (1993 – 1998)
- 7) Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel (1998 – 2004)
- 8) Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel (2004 – 2007)
- 9) Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel (2007 – 2009)
- 10) Ketua AMPG Provinsi Sulsel (2004 – 2009)
- 11) Ketua Pangda Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (Tahun 2003 – 2007)
- 12) Ketua WANHAT IPWI Provinsi Sulsel (2005 – 2008)
- 13) Ketua Ikatan Persaudraan Haji Indonesia Sulsel
- 14) Ketua PERCASI Provinsi Sulsel
- 15) Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Sulsel
- 16) Ketua Umum IKA Smansa Makassar
- 17) Ketua Umum Makassar Golf Club (MGC)
- 18) Ketua Depinda SOKSI Sulsel (Sekarang)
- 19) Ketua IOF Sulsel (Sekarang)

h. Daftar riwayat hidup Ahmad Tanribali Lamo

Ahmad Tanribali Lamo lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 November 1952. Ahmad Tanribali Lamo adalah mantan perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat. Saat masih menjadi perwira beliau sempat menjabat sebagai gubernur sementara di beberapa Provinsi, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan. Tanribali juga merupakan anak dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan Achmad Lamo. Berikut daftar riwayat pekerjaan Ahmad Tanribali Lamo :

- 1) Direktur Ajudan Jenderal TNI AD
- 2) Wakil Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Darat
- 3) Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2003)
- 4) Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan (2008)
- 5) Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa & Politik Kementerian Dalam Negeri RI (2009-sekarang)
- 6) Pejabat Gubernur Sulawesi Tengah (2011)
- 7) Pejabat Gubernur Papua Barat (2011-2012)
- 8) Pejabat Gubernur Maluku Utara (2013-2014)

2. Letak Geografi Provinsi Sulawesi Selatan

Propinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi pada posisi antara 0° 12' Lintang Utara dan 8° Lintang Selatan serta antara 116° 48'-122° 36' Bujur Timur.⁴

Wilayah propinsi ini berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Selat Makassar di sebelah barat. Luas wilayah mencapai 6.248.254 hektare atau sekitar 42 persen dari luas Pulau Sulawesi dan 4,1 persen dari luas seluruh kepulauan Indonesia secara administratif dibagi dalam 23 daerah tingkat II yaitu Kabupaten Selayar dengan luas daratan adalah 903,35 kilometer persegi, Kabupaten Bulukumba seluas 1.154,67 kilometer persegi, Kabupaten Bantaeng dengan luas wilayahnya sekitar 395,83 kilometer persegi, Kabupaten Jeneponto seluas 737,64 kilometer persegi, Kabupaten Gowa dengan luas 1.883,33 kilometer persegi, Kabupaten Takalar dengan luas wilayahnya 566,51 kilometer persegi, Kabupaten Sinjai mempunyai luas wilayah 819,96 kilometer persegi, Kabupaten Bone seluas 4.559 kilometer persegi, Kabupaten Pangkajene

⁴ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, h. 27

Kepulauan dengan luas wilayah 1.112,29 kilometer persegi, kabupaten Pinrang dengan wilayah seluas 1. 681,12 kilometer persegi, Kabupaten Barru mencakup wilayah seluas 1.174,72 kilometer persegi, Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai luas wilayah 1. 883,30 kilometer persegi, Kabupaten Soppeng dengan wilayah seluas 1.500 kilometer persegi, Kabupaten wajo yang mempunyai luas sekitar 2.506,19 kilometer persegi, Kabupaten Maros mencakup luas 1. 619 kilometer persegi, Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 1. 786,02 kilometer persegi, Kabupaten Tana Toraja 3.205,80 kilometer persegi, Kabupaten Luwu dengan luas wilayah 17.791,43 kilometer persegi, Kabupaten Polmas dengan luas 4.781,53 kilometer persegi, Kabupaten mamuju memiliki luas wilayah lebih kurang 11.057,84 kilometer persegi, Kabupaten Majene 947,81 kilometer persegi, Kotamadya Ujung Pandang dengan luas wilayahnya 175,77 kilometer persegi dan Kotamadya Pare-Pare dengan luas wilayah 99,33 kilometer persegi.⁵

Tanggal 5 Oktober 2004 Kabupaten Majene, Kabupaten Polmas dan Kabupaten Mamuju resmi berpisah dari bagian Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2004 dengan membentuk Provinsi baru yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan menjadikan Mamuju sebagai ibukota Provinsi. Sehingga data terbaru yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 menjadi 45.765 kilometer persegi dengan rincian berikut :

⁵ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, h. 27-29

Gambar 4.1

Tabel Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

Wilayah Sulawesi Selatan	Luas (km2)	Presentase Luas Wilayah (Persen)
Kepulauan Selayar	904	1.97
Bulukumba	1 155	2.52
Bantaeng	396	0.86
Jenepono	903	1.97
Takalar	567	1.24
Gowa	1 883	4.12
Sinjai	820	1.79
Maros	1 619	3.54
Pangkajene Kepulauan	1 112	2.43
Barru	1 175	2.57
Bone	4 559	9.96
Soppeng	1 359	2.97
Wajo	2 506	5.48
Sindereng rappang	1 883	4.12
Pinrang	1 961	4.29
Enrekang	1 786	3.90
Luwu	3 000	6.56
Tana Toraja	2 054	4.49
Luwu Utara	7 503	16.39
Luwu Timur	6 945	15.18
Toraja Utara	1 151	2.52

Makassar	176	0.38
Pare-pare	99	0.22
Palopo	248	0.54
Sulawesi Selatan	45 765	100

(Sumber : situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan)

3. Demografi Provinsi Sulawesi Selatan

Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2015 penduduk Sulawesi Selatan berjumlah 8.520.304 jiwa yang tersebar di 24 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk terbesar 1.449.401 jiwa yang berada di Kota Makassar. Secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin.

Dari 8.520.304 jiwa jumlah penduduk Sulawesi Selatan, berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Sulawesi Selatan pada pemilihan presiden tahun diperoleh 6.323.711 jiwa dapat dilihat pada lampiran.

B. Aktivitas Spin Doctor Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan

Spin doctor memiliki peran penting dalam setiap pergantian kepemimpinan, baik itu kepala negara maupun kepala daerah. Mereka dengan keahliannya memainkan isu agar mampu menggalang opini positif publik dan memenangkan kandidat yang diusungnya. Sebagaimana pemilihan Gubernur tahun 2018 mendatang peneliti hanya terfokus pada 3 pasangan bakal calon kandidat Gubernur Sulawesi Selatan yang nampaknya telah memiliki peluang besar maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dua diantaranya mendapatkan rekomendasi dan surat tugas dari beberapa partai. Kedua pasangan tersebut adalah Nurdin Halid berpasangan dengan Aziz Kahar Muzakkar dan Nurdin Abdullah berpasangan dengan Andi

Sudirman Sulaiman. Sementara itu satu pasangan bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan yang diperkirakan memiliki peluang melalui jalur perseorangan yaitu Ichsan Yasin Limpo berpasangan dengan Andi Muzakkar.

1. Aktivitas *Spin Doctor* Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Sulawesi Selatan

Nurdin Halid yang awalnya sempat kabarkan akan berpasangan dengan beberapa tokoh masyarakat Sulawesi Selatan salah satunya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, M. Roem. Setelah beberapa waktu akhirnya, ia memilih Aziz Kahar Muzakkar yang merupakan tokoh agama di Sulawesi Selatan.

Saat itu Partai Golkar adalah satu-satunya partai yang bersedia mengusung mereka, meski demikian kuota kursi di DPRD Provinsi telah memenuhi syarat minimal partai untuk mengusung bakal calon kandidat gubernurnya. Partai Golkar dapat dengan mudah diperolehnya dengan posisi Nurdin Halid sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar dan pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 15 September 2017 Partai Nasdem yang diperkirakan akan mengusung bacalon lain pun ikut bergabung dengan tim Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPW Sulawesi Selatan di Hotel Clarion Makassar.⁶

Partai Nasdem tidak serta-merta berbelok arah dalam mengusung calonnya, namun telah terjadi komunikasi politik dan kesepakatan diantara para petinggi partai. Menurut analisa peneliti kesepakatan yang terjadi ialah Partai Nasdem memberikan rekomendasi kepada Ketua Harian Partai Golkar untuk mengusungnya di pemilihan

⁶ Yusran Uccang, "Nasdem-Golkar Berkoalisi Usung Nurdin Halid-Aziz di Pilkada Sulsel", *Kompas.com*, 15 September 2017. <http://regional.kompas.com/read/2017/09/15/05563661/nasdem-golkar-berkoalisi-usung-nurdinhalid-aziz-di-pilkada-sulsel>, (Diakses 05 November 2017)

Gubernur dan umpan baliknya Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada istri Ketua DPW Partai Nasdem untuk mengusungnya di pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebab dalam rentang waktu yang tak cukup lama setelah Partai Nasdem mengeluarkan SK rekomendasi kepada Nurdin Halid, Partai Golkar juga mengeluarkan SK rekomendasi kepada Fatmawati, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai PPP.

Pasangan Nurdin Halid – Aziz Kahar Makassar yang diusung Partai Golkar dan Partai Nasdem memiliki 25 total kursi di DPRD Provinsi dengan rincian 18 kursi dari Partai Golkar dan 7 kursi dari Partai Nasdem. 25 kursi ini bukan jumlah yang paten, sebab dukungan partai lain pun juga semakin bertambah. Selasa, tanggal 7 September 2017 kemarin Partai PKB pun turut memberikan dukungan politiknya kepada pasangan Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar yang sebelumnya telah menyatakan mengalihkan dukungan kepada bakal calon Gubernur lainnya, yaitu Agus Arifin Nu'mang dengan memberikan surat rekomendasi. Jika melihat dari perolehan kursi yang diterima, pasangan ini telah memenuhi syarat minimal kursi di DPRD untuk mendaftar di KPU sebagai calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 mendatang, yaitu 17 kursi.

Keberhasilan ini tak terlepas dari keahlian *spin doctor* meramu pesan agar dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Sehingga mampu meningkatkan survei popularitas dan elektabilitas bakal calon kandidat yang diusungnya. Perlu kita ketahui bahwa popularitas dan elektabilitas adalah salah satu faktor yang cukup diperhatikan partai politik sebelum menentukan bakal calon kandidat yang diusungnya. Adapun kegiatan *spin doctor* Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar menjelang pemilihan Gubernur 2018 mendatang ialah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan kerja kader Partai Golkar dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Desa/Kelurahan

Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas Ketua DPD I Partai, Golkar Sulawesi Selatan memiliki hak dan wewenang untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi adalah kegiatan rutin Partai Golkar setiap kepengurusan baru dengan melakukan musyawarah daerah.

Pelaksanaan musyawarah ini dilakukan untuk merevitalisasi pengurus dengan memasukkan pengurus baru ke dalam struktur kepengurusan. Memaksimalkan kerja kader Partai Golkar dengan menggalang suara atau kader baru di setiap tingkatan kepengurusan. Adanya pengurus baru yang ikut menjadi kader Partai Golkar diharapkan mampu menambah suara bakal calon kandidat Partai Golkar pada setiap momentum politik.

Arfandy Idris selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantaeng sekaligus Wakil Ketua Koordinator GNH 17 Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan :

“Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali, semua struktur Partai Golkar di Indonesia itu akan dilakukan proses penataan kembali seluruh struktur organisasi kelembagaan Partai Golkar. Salah satunya melakukan pergantian pengurus karena seluruh Indonesia masa bakti kepengurusan Partai Golkar itu sudah berakhir satu tahun lebih. Maka DPP mengeluarkan kebijakan menyangkut pelaksana tugas di masing-masing Provinsi yang belum melakukan konsolidasi organisasi. Maka ditunjuklah Pak Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus menunjuk Pak Nurdin Halid membentuk kepengurusan DPD Partai Sulawesi Selatan. Dengan posisinya sebagai pelaksana tugas Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar mempererat basis dukungannya sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Karena Pak Nurdin ini, maka hasil konsolidasi tadi diperkuat dengan semua jajaran yang ada yaitu semua pimpinan desa sesulawesi selatan untuk meningkatkan basis supaya lebih meluas maka untuk semua masyarakat yang ingin membantu dalam peningkatan elektabilitasnya melalui pembentukan relawan-relawan.”⁷

⁷ Arfandi idris.21 Oktober 2017

b. Mempromosikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan kandidat

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Nurdin Halid dan Aziz Qahar Muzakkar kini sering kita dapatkan di berbagai media lokal, baik itu cetak maupun elektronik, dapat dilihat pada lampiran. Promosi kegiatan sosialisasi ini adalah salahsatu bentuk kegiatan dalam memperkenalkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar yang diharapkan juga mampu meningkatkan elektabilitasnya.

c. Meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya

Pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar merupakan pasangan yang tak luput dari berita-berita negatif. Bahkan sejak awal menyatakan kesiapan diri untuk ikut serta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2018 mendatang keduanya telah diserang dengan berita negatif.

Nurdin Halid misalnya isu pertama yang menyerangnya ialah mengenai persoalan hukum yang pernah menyeretnya ke penjara. Pemberitaan seperti ini tentu merugikan pihak Nurdin Halid karena dinilai mampu menurunkan elektabilitas pasangan bakal calon Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar. Hal ini tentu diperlukan keahlian *spin doctor* untuk meredam berita negatif menjadi positif. Menanggapi hal itu Nurdin melakukan jumpa pers untuk menenangkan pendukungnya.⁸

Isu terbaru saat ini ialah setelah beberapa waktu Ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto ditahan KPK, dikabarkan bahwa Nurdin Halid diisukan belum pasti

⁸ Didit Hariyadi, "Nurdin Halid Kena Kampanye Negatif Menjelang Pilgub Sulsel 2018", <https://nasional.tempo.co/read/902478/nurdin-halid-kena-kampanye-negatif-menjelang-pilgub-sulsel-2018>, (diakses 5 Desember 2017)

maju bersama Aziz pada pemilihan gubernur 2018 mendatang sebab selain sibuk mengurus partai, ia juga dikabarkan bakal menjadi Menteri.⁹

d. Menyusun *tagline*

Tagline adalah salahsatu penanda bagi seorang calon kepala daerah, karena memiliki ciri khas yang dianggap mewakili si calon. Adapun *tagline* pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar “Sama-Samaki Bangun Kampung” yang tentu memiliki makna. Arfandy Idris selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantaeng sekaligus Wakil Ketua Koordinator GNH 17 Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan :

“Ini harus sinergikan/disesuaikan dengan program pemerintah secara terpusat. Bukankah Presiden dalam nawacitanya salah satu itu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran? Pinggiran ini di interpretasi bahwa itu kampung. Makna untuk mengsinergikan program kabupaten atau kota dengan pemerintah provinsi maupun pusat, maka Pak Nurdin membuat sebuah tagline sama-samaki bangun kampung”.¹⁰

Makna *tagline* “Sama-Samaki Bangun Kampung” menurut Muhammad Yusuf selaku Ketua Tim Media Center Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar ialah :

“Pak NH ini sudah lama tidak disini. Boleh dikata mereka ini tokoh nasional. Dia pulang mau membangun kampung. Titik krusialnya ini dimana orang yang sudah menikmati kebaikan pusat, semua itu ternyata dia lupakan dan pulang membangun kampung. Nah, pesan ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Kedua yakni sama-samaki. NH ingin menyampaikan kepada masyarakat SulSel di kembali ke sini membangun kampung dengan prinsip sama-samaki. Prinsip sama-samaki itu maksudnya membangun kolektifitas dalam pengambilan kebijakan dan menempatkan aspirasi dari bawah untuk menentukan kebijakan”.¹¹

e. Menyampaikan visi misi program prorakyat

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar memiliki visi dan misi yang bersinergi dengan *taglinenya* bersama

⁹ Hasim Arfah, “Nurdin Halid Mundur dari Pilgub Sulsel dan bakal Jadi Menteri? Ini Kata Ketua Bapilu Golkar”, <http://makassar.tribunnews.com/2017/11/02/nudin-halid-mundur-dari-pilgub-sulsel-dan-bakal-jadi-menteri-ini-kata-ketua-bapilu-golkar>, (diakses 5 Desember 2017)

¹⁰

¹¹ Muhammad Yusuf, 22 Oktober 2017

membangun kampung dengan visi “TriKarya Pembangunan Sulsel : Kemartaban Rakyat, Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial” dengan misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Selatan.
- 3) Mewujudkan kemajuan dan kemandirian ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat.
- 4) Membangun kualitas sumber daya manusia berkarakter unggul yang terbuka, demokratis pluralistik, produktif dan kompetitif dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan serta kearifan lokal.
- 5) Memperkuat jatidiri Sulsel dan Makassar sebagai provinsi dan kota maritim.

2. Aktivitas *spin doctor* Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Sulawesi Selatan

a. Mempromosikan keberhasilan kandidat sebagai Bupati Bantaeng

Spin doctor memiliki beberapa tugas, salahsatunya ialah bertugas membangun citra positif bagi kandidatnya. Dalam membangun citra positif Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman *spin doctor* melakukan promosi mengenai keberhasilan Nurdin Abdullah sebagai Bupati dalam memperkenalkan dan menata kota Kabupaten Bantaeng dengan maksud memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Nurdin Abdullah mampu menata Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang telah dilakukannya di Kabupaten Bantaeng. Dengan kata lain, jika ia terpilih pada pemilihan gubernur 2018 mendatang maka pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan bercermin pada pembangunan Kabupaten Bantaeng.

b. Meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya

Tugas *spin doctor* selain membangun citra positif kandidatnya juga memberikan kesan negatif pada saingan politiknya. Berita negatif terhadap pasangan

Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman tak dapat dipungkiri mampu meresahkan para pendukung maupun tim pemenangan. Hal ini tentu diperlukan keahlian *spin doctor* agar mampu mengantisipasi sesuatu yang diluar rencana. *Spin doctor* bertanggung jawab meredam isu itu dan mengubahnya menjadi isu positif.

Berita negatif terbaru yang tertuju kepada pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman ialah mengenai rekomendasi Partai Gerindra yang beralih ke Agus Arifin Nu'mang setelah Agus Arifin Nu'mang bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada akhir bulan November kemarin. Berita ini segera direspon baik oleh *spin doctor* pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dengan melakukan klarifikasi di media salah satunya Celebes TV dengan menampilkan Staff Khusus Nurdin Abdullah yang juga tergabung dalam Tim Media Center Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, Bunyamin H Arsyad pada hari Jum'at, 1 Desember 2018.

Pada saat itu Bunyamin H Arsyad menyampaikan bahwa pertemuan Agus Arifin Nu'mang dengan Prabowo Subianto adalah pertemuan biasa antara pemerintah dan pimpinan partai dan rekomendasi Partai Gerindra telah resmi diberikan kepada pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dengan menampilkan surat rekomendasi yang dimaksud, dapat dilihat pada lampiran.

- c. Mencari pendamping yang mampu meningkatkan survei kandidat sekaligus memberi respon positif terhadap partai pengusung

Pasangan bakal calon Gubernur Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman merupakan pasangan yang telah melalui fase pergantian pasangan. Nurdin Abdullah awalnya telah menggandeng seorang mantan perwira tinggi yang juga merupakan anak mantan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakilnya yaitu, Ahmad Tanri Bali Lamo. Pasangan Nurdin Abdullah – Ahmad Tanri Bali Lamo yang dikenal dengan

singkatan NH-TBL mulai terjalin sejak Desember 2015 lalu. Bahkan keduanya telah melakukan deklarasi pasangan beberapa bulan yang lalu. Sejak saat itu, baliho NA-TBL bermunculan di beberapa daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Bulan Maret kemarin pasangan NA-TBL di kabarkan akan segera melakukan deklarasi, paling lambat bulan Mei.

Dua tahun NA-TBL telah berkomitmen dan berjalan dengan harapan mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya agar mereka dilirik dan diusung oleh partai. Nurdin Abdullah melalui hasil wawancara *Tribun Timur* mengakui perjuangan ini ternyata tak cukup meski telah ditunjang dengan karya dan prestasi keduanya.¹² Akhir september kemarin akhirnya telah diberitakan bahwa Nurdin Abdullah tak lagi berpasangan Ahmad Tanri Bali Lamo. Posisi Tanri Bali Lamo, kabarnya bakal digantikan oleh sejumlah figur. Beberapa diantaranya ialah Sudirman Sulaiman, adik kandung Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Aliyah Mustika Ilham (anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI), ada nama Andi Idris Manggabarani (Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel).

Pergantian calon Wakil Gubernur pendamping Nurdin Abdullah terjadi karena beberapa faktor berdasarkan hasil wawancara peneliti, diantaranya :

- a. Ketidakmampuan Ahmad Tanri Bali Lamo *melobby* partai

Rahman Rumaday selaku Ketua Deputy Jaringan PKS dan juga Sekertaris Jendral dalam Tim Relawan Pemuda NAC mengatakan :

¹²Abdul Azis Alimuddin, “Begini Kisah 'Cinta' NA dan Tanribali Lamo (1)”, *Tribun Timur*, 19 September 2017, <http://makassar.tribunnews.com/2017/09/19/begini-kisah-cinta-na-dan-tanribali-lampo-1>, (diakses 15 November 2017)

“salah satu penyebab pak Prof (Nurdin Abdullah) menggantikan Tanri Bali Lamo karena dia (Tanri Bali Lamo) tidak punya kemampuan melobby partai sehingga pak Prof yang turun langsung”.¹³

b. Dana

Bunyamin H. Arsyad selaku Staf khusus Bupati Bantaeng (Nurdin Abdullah) sekaligus anggota Tim Media Center NA-ASS mengatakan :

“Kan gini, misalnya kita udah ada 17 kursi. Tapi bagaimana nanti mekanisme pergerakan? Pergerakan ini harus dibiayai dengan uang, tidak cukup dengan partai saja. Kita lihat lagi bagaimana untuk membiayai pergerakan, sosialisasi dan kampanye. Partai memang yang minta tapi pak Tanri tidak mampu disitu”.¹⁴

c. Wakil ditentukan oleh partai pengusung

Rahman Rumaday selaku Ketua Deputy Jaringan PKS dan juga Sekertaris Jendral dalam Tim Relawan Pemuda NAC mengatakan :

“Dalam penentuan calon Wakil Gubernur itu partai koalisi yg menentukan”.¹⁵

d. Kesepakatan

Bunyamin H. Arsyad selaku Staf khusus Bupati Bantaeng (Nurdin Abdullah) sekaligus anggota Tim Media Center NA-ASS mengatakan :

“Bulan 6 kita melakukan survei, bulan 7 kita survei lagi. Setelah hasil survei bulan 7 keluar, kami melakukan pertemuan beberapa kali dengan pak Tanri Bali. Pak Prof (Nurdin Abdullah) bilang, ini hasil survei kita. Pak Tanri turun, kalau kita gabung tidak memungkinkan untuk menang, lebih baik kita berhenti. Pak

¹³ Rahman Rumaday (31 tahun), Ketua Deputy Jaringan Partai Keadilan Sejahtera, *Wawancara*, Makassar 15 November 2017

¹⁴ Bunyamin H. Arsyad (51 tahun), Anggota Tim Media Center NA-ASS, *Wawancara*, Makassar 24 Oktober 2017

¹⁵ Rahman Rumaday (31 tahun), Ketua Deputy Jaringan Partai Keadilan Sejahtera, *Wawancara*, Makassar 15 November 2017

Tanri bilang jangan pak Prof, pak Prof itu menjadi harapannya masyarakat. Pak Prof harus lanjut jangan jadikan saya sebagai penghalang biarlah pak Prof yang maju. Kesepakatan ini akhirnya dia bilang jangan pak Prof, mengenai saya awalnya kita mau mengabdikan, mengabdikan itu dimana saja dalam kapasitas apa saja”.¹⁶

Kekurangan yang dimiliki Ahmad Tanri Bali Lamo ini menjadi kelebihan Andi Sudirman Sulaiman, ia mampu memenuhi semua hal itu :

a. *Lobby Partai*

Andi Sudirman Sulaiman merupakan adik kandung dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Amran Sulaiman sebagai seorang menteri tentunya memiliki hubungan baik dengan orang-orang pusat termasuk para petinggi partai. Hubungan inilah yang memudahkan Andi Sudirman Sulaiman untuk melobby partai dengan bantuan kakaknya. Hal ini diperjelas oleh Rahman Rumaday selaku Ketua Deputy Jaringan PKS dan juga Sekretaris Jendral dalam Tim Relawan Pemuda NAC mengatakan :

“Pak Prof turun langsung lobby partai. Pak Tanri tidak punya kemampuan disitu. Nah kelebihanannya pak Sudirman disitu, dia kan kakaknya orang pusat sebagai menteri, dia yang bantu ini kan”.¹⁷

b. Dana

Pemilihan Kepala Daerah adalah ajang pesta demokrasi yang tentunya membutuhkan pembiayaan tak sedikit. Seorang calon pemimpin daerah dituntut tak hanya mengandalkan ketokohnya untuk mendapatkan dukungan partai dan

¹⁶ Bunyamin H. Arsyad (51 tahun), Anggota Tim Media Center NA-ASS, *Wawancara*, Makassar 24 Oktober 2017

¹⁷ Rahman Rumaday (31 tahun), Ketua Deputy Jaringan Partai Keadilan Sejahtera, *Wawancara*, Makassar 15 November 2017

memenangkan hati masyarakat agar memilihnya. Selain dari itu mereka juga harus memiliki dana, minimal cukup untuk membiayai sosialisasi dan kampanye. Namun sebagai orang yang tak memiliki partai atau dengan kata lain bukan kader partai dan ingin mencalonkan melalui pintu partai. Seorang calon pemimpin perlu persiapan dana lebih untuk sumbangan ke partai, sama halnya dengan pasangan NA-TBL. Ahmad Tari Bali Lamo tak mampu memenuhi permintaan partai. Bunyamin H. Arsyad selaku Staf khusus Bupati Bantaeng (Nurdin Abdullah) sekaligus anggota Tim Media Center NA-ASS mengatakan :
“Kita lihat lagi bagaimana dengan membiayai pergerakan sosialisasi dan kampanye. Partai memang yang minta, tapi pak Tanri tak mampu disitu. Itulah yang terjadi sehingga Pak Andi Sudirman Sulaiman terpilih”

c. Wakil ditentukan Partai pengusung

Pemilihan calon Wakil Gubernur yang akan mendampingi Nurdin Abdullah tidak hanya ditentukan oleh Nurdin Abdullah sendiri, melainkan melibatkan koalisi partai pengusung pula.

d. Kesepakatan

Berdasarkan kesepakatan partai pengusung yang telah memilih Andi Sudirman Sulaiman menjadi pendamping Nurdin Abdullah.

Pada tanggal 22 Oktober 2017 pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman melakukan deklarasi pasangan di Lapangan Karebosi Makassar. Beberapa hari setelah deklarasi, survei pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman meningkat secara signifikan dengan mengungguli pasangan calon kandidat lainnya. Berbeda dengan sebelumnya saat Nurdin Abdullah berpasangan dengan Ahmad Tanri Bali Lamo survei pasangan calon kandidat semakin redup (menurun), bahkan tak satupun rekomendasi partai mampu didapatkannya. Hal ini membuktikan bahwa

Andi Sudirman Sulaiman adalah wakil yang mampu membantu meningkatkan survei pasangan calon kandidat Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman bila dibandingkan dengan pasangan calon kadidat sebelumnya, Nurdin Abdullah-Ahmad Tanri Bali Lamo.

Beberapa faktor yang disebutkan di atas menjadikan Andi Sudirman Sulaiman terpilih menjadi wakil Nurdin Abdullah, Andi Sudirman mampu memenuhi kekurangan yang dimiliki Ahmad Tanri Bali Lamo.

d. Menyusun *tagline*

Tagline kata yang mudah diingat dan digunakan oleh kelompok atau bisnis untuk menarik perhatian. *Tagline* banyak digunakan oleh bakal calon kandidat pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala negara maupun kepala daerah untuk memperkenalkan diri mereka dan mudah diingat masyarakat. Pasangan bakal calon gubernur Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman memiliki *tagline* yang dikenal dengan “Maju Bersama Prof Andalan”. *Tagline* tersebut memiliki makna ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama mendukung pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam pemilihan gubernur 2018. Bunyamin H. Arsyad selaku Staf khusus Bupati Bantaeng (Nurdin Abdullah) sekaligus anggota Tim Media Center NA-ASS mengatakan :

“Itu dari relawan. Masing-masing relawan bikin. Minimal itu mereka menempatkan diri bagian dari Prof. Mereka mengajak kelompok relawan dan pemilih untuk bersama-sama Pak Prof. Kebersamaan itu bukan hanya pada pilkada tetapi juga setelah pilkada. Mereka merasa bagian dan Pak Prof menjadikan rakyat sebagai bagian yang menjadi satu kesatuan”.¹⁸

e. Menyampaikan visi misi program kerakyatan

Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman sebagai bakal calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentu memiliki visi dan

¹⁸ Bunyamin H. Arsyad. 28 November 2017

misinya dalam menjalankan program kerjanya jika terpilih nanti. Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman memiliki visi “Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Bagian Selatan Sulawesi Selatan Tahun 2018” dengan visi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kapasitas penduduk
- 2) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan kelautan
- 3) Meningkatkan jaringan perdagangan, industri dan pariwisata
- 4) Memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu
- 5) Penguatan kelembagaan pemerintah.

3. Aktivitas *Spin Doctor* Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar adalah satu-satunya pasangan yang ikut serta dalam pemilihan gubernur melalui jalur perseorangan atau lebih dikenal dengan istilah *independent*. Sebelumnya mereka mencoba menempuh jalur partai tetapi sampai masa pendaftaran pencalonan jalur *independent* tiba, partai yang didapatkannya belum mencukupi batas minimal kursi DPRD sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan KPU yakni 17 kursi.

Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar hanya memperoleh dukungan 11 kursi dari Partai Demokrat sementara partai politik lain telah memberikan rekomendasi kepada calon lainnya. Adapun kegiatan *Spin Doctor* Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan:

a. Mempromosikan kelebihan dan kegiatan sosialisasi kandidat

Pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar merupakan kombinasi pasangan yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, keduanya telah

menjabat menjadi bupati 2 periode di 2 Kabupaten berbeda yang masing-masing memiliki jumlah pemilih tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ichsan Yasin Limpo adalah mantan Bupati di Kabupaten Gowa dan Andi Muzakkar adalah mantan Bupati di Kabupaten Luwu dengan berbekal pengalaman tersebut mereka dapat dikatakan telah memiliki lumbung suara atau lebih dikenal dengan istilah basis suara.

Ichsan Yasin Limpo juga memiliki kekuatan dari kerabat dekatnya yang sebagian besar merupakan pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan, sebut saja saudaranya Syahrul Yasin Limpo yang merupakan Gubernur Sulawesi Selatan. Oleh karena itu *spin doctor* dalam aktivitas pengenalan kandidat tidak membutuhkan tenaga ekstra karena dengan pengalaman tersebut Ichsan Yasin Limpo dan Andi Muzakkar telah dikenal sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan. Namun demikian, *spin doctor* tetap harus bekerja maksimal dalam mensosialisasikan program unggulan pasangan yang dikenal dengan sinonim “*Punggawa Macakka*” yaitu memberikan kesejahteraan rakyat dengan mengedepankan kemanusiaan dan pendidikan.

b. Meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya

Spin doctor selain bertugas untuk meningkatkan citra positif kandidat yang diusungnya, ia juga bertugas untuk meredam berita negatif yang menyerang kandidat yang diusungnya. Hal demikianlah yang dilakukan oleh *spin doctor* pasangan yang populer dengan sebutan “*Punggawa Macakka*” ini. Meredam berita negatif mereka tidak serta merta melakukan konfirmasi secara langsung atau konferensi pers tetapi dengan cara mengekspos kegiatan sosialisasi dan kelebihan kandidatnya di berbagai media. Cara ini diharapkan mampu meredam berita atau isu negatif yang menyerang kandidat yang diusungnya karena tertimbun atau tertutupi oleh kegiatan-kegiatan positif yang dieksposnya.

c. Menyusun *tagline*

Tagline sebagai ciri khas pasangan calon merupakan sandi yang mudah diingat dan terdengar familiar di masyarakat khususnya para pemilik hak suara dalam pemilihan Gubernur 2018 mendatang. Adapun *tagline* pasangan Ichsan Yasin Limpo dengan Andi Muzakkar ialah “*Punggawa Macakka*”.

d. Menyampaikan visi misi program prorakyat

Setiap pasangan calon kandidat Gubernur memiliki visi misi program prorakyat, pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar memiliki beberapa program yaitu :

- 1) Pendidikan berkualitas, merata tanpa pungutan
- 2) Rumah produktif untuk menciptakan lapangan kerja
- 3) Pembangunan yang merata untuk Sulawesi Selatan
- 4) Subsidi pendidikan 1,5 Triliun pertahun

4. Aktivitas *Spin Doctor* Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo
Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan

Agus Arifin Nu'mang adalah calon Gubernur dari petahana, sebelumnya ia menjabat sebagai wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mendampingi Syahrul Yasin Limpo selama 2 periode (2008-2018). Ahmad Tanribali Lamo sendiri merupakan mantan perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat anak dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Lamo. Sebelumnya Ahmad Tanribali Lamo juga pernah menjabat sebagai Gubernur sementara pada tahun 2008.

Pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo adalah pasangan yang tak terduga sebelumnya. Tepatnya, setelah Ahmad Tanribali Lamo ditinggal Nurdin Abdullah dan Agus Arifin Nu'mang-Aliyah Mustika Ilham tak mampu memenuhi perolehan kursi minimum. Keduanya menyatakan sikap mendukung salah satu pasangan calon lainnya, bahkan turut hadir pada malam deklarasi yang dihadiri

oleh beberapa pimpinan partai. Ketidakmungkinan itu semakin meyakinkan setelah partai PKB yang merupakan satu-satunya pendukung pasangan bakal calon Agus Arifin Nu'mang-Aliyah Mustika Ilham memberikan rekomendasi kepada calon lainnya. Namun berkat usaha dan kegigihan tim dan *spin doctor* Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo mereka berhasil mendapatkan rekomendasi partai pada detik-detik terakhir pendaftaran bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

- a. Mempromosikan keberhasilan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2018 dan kegiatan sosialisasi kandidat

Agus Arifin Nu'mang yang merupakan mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2018 memperkenalkan diri sebagai calon Gubernur periode selanjutnya dengan mempromosikan keberhasilan-keberhasilan yang dicapainya 10 tahun silam saat menjabat sebagai pemimpin daerah mendampingi Syahrul Yasin Limpo. Keberhasilan yang dimaksud berupa pembangunan dan peningkatan persentase perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir.

- b. Meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya

Spin doctor pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo memiliki tugas sebagaimana tugas *spin doctor* pada umumnya yaitu meningkatkan citra positif dan meredam berita negatif yang menyerang kandidat yang diusungnya. secara umum aktivitas *spin doctor* Agus-TBL mirip dengan aktivitas *spin doctor* pasangan yang lain dalam meredam berita negatif, mereka meredam dengan cara terus mengekspos hal-hal positif tentang pasangan yang diusung agar berita negatif yang tadinya muncul tertutupi dengan berita-berita positif terbaru.

c. Menyusun *tagline*

Pasangan Agus Arifin Nu'mang dengan Ahmad Tanribali Lamo menggunakan *tagline* atau tanda pengenal dengan sebutan “Sulsel Bagus”. Adapun filosofi yang dimaksudkan ialah pembangunan Sulawesi Selatan pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan dan lebih ditingkatkan .

d. Menyampaikan visi misi program prorakyat

Program prorakyat pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo memiliki gagasan yang dikenal dengan istilah “Labuba Malabo”. Sepuluh tahun sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia. BPS mencatat, angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,6 persen selama sembilan tahun. Pencapaian yang begitu fantastis ini sudah cenderung memuncak. Jika salah mengambil kebijakan, perekonomian sulsel bisa turun. Karena itu, dibutuhkan perubahan landasan kebijakan pembangunan ke depan agar ekonomi sulsel bisa dipertahankan.

Pengwilayahan komoditas merupakan landasan kebijakan perekonomian yang telah membawa kemajuan Sulawesi Selatan sampai saat ini. Hal mana butuh dilakukan penyesuaian kebijakan pembangunan sesuai kondisi dan konteks kewenangan saat ini. Oleh karena itu, kami menawarkan landasan kebijakan pembangunan melalui pendekatan pengembangan tiga kawasan di pegunungan dan dua kawasan di pesisir dan pulau-pulau. Konsep pengembangan kawasan ini kami beri nama labuba malabo. Labuba singkatan dari Latimojong, Bulusaraung dan Bawakaraeng. sementara malabo adalah selat makassar, laut flores, dan teluk bone. pengembangan kawasan labuba malabo akan mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan.

Labuba malabo akan mengurangi pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, dan melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat sulawesi selatan. Pemerataan akan dimulai dengan membangun 500 km jalan strategis provinsi. Jalan yang menghubungkan atau membangun konektivitas atas wilayah dan kawasan dalam wilayah labuba malabo yang masing-masing terdiri atas delapan kabupaten/kota. Jalan yang akan membuka akses lahan pertanian dan perkebunan baru antar dan lintas kawasan.

Labuba malabo adalah konsep pembangunan yang tidak hanya akan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. labuba malabo akan membangun dengan memperhatikan faktor ekologis dan masyarakat dalam kawasan tersebut.

Adapun visi pasangan Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo ialah “Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Bagian Selatan Sulawesi Selatan Tahun 2018” sedangkan misinya :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kapasitas penduduk
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan kelautan
3. Meningkatkan jaringan perdagangan, industri dan pariwisata
4. Memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu
5. Penguatan kelembagaan pemerintah

C. Strategi Spin Doctor Menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Propinsi Sulawesi Selatan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam

kurun waktu tertentu. Berikut beberapa strategi *spin doctor* Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan :

1. Mendekati Partai Politik

Pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahar Muzakkar pada awalnya Partai Golkar adalah satu-satunya partai yang bersedia mengusung mereka, meski demikian kuota kursi di DPRD Provinsi telah memenuhi syarat minimal partai untuk mengusung bakal calon kandidat gubernurnya. Partai Golkar dapat dengan mudah diperolehnya dengan posisi Nurdin Halid sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar dan pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 15 September 2017 Partai Nasdem yang diperkirakan akan mengusung bacalon lain pun ikut bergabung dengan tim Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPW Sulawesi Selatan di Hotel Clarion Makassar.¹⁹

Partai Nasdem tidak serta-merta berbelok arah dalam mengusung calonnya, namun telah terjadi komunikasi politik dan kesepakatan diantara para petinggi partai. Menurut analisa peneliti kesepakatan yang terjadi ialah Partai Nasdem memberikan rekomendasi kepada Ketua Harian Partai Golkar untuk mengusungnya di pemilihan Gubernur dan umpan baliknya Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada istri Ketua DPW Partai Nasdem untuk mengusungnya di pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebab dalam rentang waktu yang tak cukup lama setelah Partai Nasdem mengeluarkan SK rekomendasi kepada Nurdin Halid, Partai

¹⁹ Yusran Uccang, "Nasdem-Golkar Berkoalisi Usung Nurdin Halid-Aziz di Pilkada Sulsel", *Kompas.com*, 15 September 2017. <http://regional.kompas.com/read/2017/09/15/05563661/nasdem-golkar-berkoalisi-usung-nurdinhalid-aziz-di-pilkada-sulsel>, (Diakses 05 November 2017)

Golkar juga mengeluarkan SK rekomendasi kepada Fatmawati, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai PPP.

Pasangan Nurdin Halid – Aziz Kahar Makassar yang diusung Partai Golkar dan Partai Nasdem memiliki 25 total kursi di DPRD Provinsi dengan rincian 18 kursi dari Partai Golkar dan 7 kursi dari Partai Nasdem. 25 kursi ini bukan jumlah yang paten, sebab dukungan partai lain pun juga semakin bertambah. Selasa, tanggal 7 September 2017 kemarin Partai PKB pun turut memberikan dukungan politiknya kepada pasangan Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar yang sebelumnya telah menyatakan mengalihkan dukungan kepada bakal calon Gubernur lainnya, yaitu Agus Arifin Nu'mang dengan memberikan surat rekomendasi. Jika melihat dari perolehan kursi yang diterima, pasangan ini telah memenuhi syarat minimal kursi di DPRD untuk mendaftar di KPU sebagai calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 mendatang, yaitu 17 kursi.

Keberhasilan ini tak terlepas dari keahlian *spin doctor* meramu pesan agar dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Sehingga mampu meningkatkan survei popularitas dan elektabilitas bakal calon kandidat yang diusungnya. Perlu kita ketahui bahwa popularitas dan elektabilitas adalah salah satu faktor yang cukup diperhatikan partai politik sebelum menentukan bakal calon kandidat yang diusungnya.

2. Menjaga Partai Pengusung supaya Tidak Mengalihkan Dukungannya

Sebelum pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dibuka secara resmi. Para calon masih merasa khawatir karena rekomendasi partai yang menjadi pegangannya juga masih memiliki peluang untuk mengalihkan dukungannya ke kandidat lain. Oleh karena itu selain memiliki strategi mendekati partai politik juga dituntut memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik

dengan partai politik agar tak mengalihkan dukungannya. Selain itu elektabilitas dan popularitas bakal calon harus tetap di kontrol agar tidak menurun.

Keberhasilan tim Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam mendapatkan dukungan partai politik tak terlepas dari peranan penting *spin doctor* dalam meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya, berikut strategi yang digunakan *spin doctor* Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman :

1. Mendekati Partai Politik

Pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman bila melihat latar belakang keduanya, tak ada yang memiliki *background* sebagai kader partai politik. Meskipun demikian mereka telah memperoleh rekomendasi dari 4 partai politik. Rilman Abdullah selaku Tim Operasional Nurdin Abdullah mengatakan :

“Rekomendasi partai saat ini ada empat yaitu PKS, PAN, Gerindra dan PDIP, tapi masih ada satu partai dalam status menunggu”.²⁰

Tanggal 22 Oktober 2017 pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman melakukan deklarasi di Lapangan Karebosi Makassar dirangkaikan dengan kegiatan jalan santai dan dihadiri oleh partai pengusung dan ribuan partisipan, lihat pada lampiran.

Setiap partai memiliki pemikiran dan pertimbangan yang berbeda untuk mengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, diantaranya :

a. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Tajuddin selaku Staf Ahli Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan :

“Setiap partai memiliki pemikiran dan pertimbangan yang berbeda, sama halnya dengan Gerindra juga memiliki indikator-indikator tertentu untuk mengusung seseorang. Kami melihat pak Nurdin Abdullah memiliki *traderecor* yang bagus dengan poin: elektabilitas, ketokohan dan *poltrack*. Yang intinya menuju kepada

²⁰ Rilman Abdullah (47 Tahun), Tim Operasional Tim Nurdin Abdullah, *Wawancara*, Makassar 20 Oktober 2017

kemaslahatan dan memang ada hal-hal bersifat politik yang menjadi pertimbangan khusus.”²¹

Tajuddin secara tidak langsung mengakui Andi Sudirman Sulaiman memiliki pengaruh dalam pengusungan Gerindra terhadap pasangan NA-ASS. Tajuddin mengatakan :

“yang jelas kehadiran beliau (andi Sudirman Sulaiman) itu membawa warna baru di percaturan politik terutama untuk Sulawesi Selatan”.²²

b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Busman Muin selaku Departemen Internal PDIP Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan :

“Ada beberapa faktor mengapa PDIP mengusung NA-ASS dengan melihat : elektabilitas, ketokohan dan tes. Internal (PDIP) melakukan seleksi dengan beberapa kali tahapan dan mekanisme panjang. Pada akhirnya nanti dari semua calon yang mendaftar tertinggi itu adalah Pak Nurdin Abdullah”.²³

Berbeda dengan Gerindra yang menyatakan Andi Sudirman Sulaiman berpengaruh dalam menentukan usungannya, Busman Muin mengatakan :

“Kita tidak mencampuri siapa yang digandeng, itu kan internal pak Nurdin Abdullah sendiri. Kan begini, pendaftaran itu kan Gubernur bukan Wakil Gubernur. Kita hanya terfokus pada Gubernurnya saja”.²⁴

c. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Rahman Rumaday selaku Ketua Deputy Jaringan PKS dan juga Sekretaris Jendral dalam Tim Relawan Pemuda NAC mengatakan :

“Sejak awalkan PKS mendukung pak Prof di Bantaeng pada periode pertamanya. Bahkan sejak berpasangan dengan Pak Tanri Bali PKS sudah mendukung hanya belum dimunculkan. Kita kalah cepat menginformasikan oleh PDIP, apalagi dia menggunakan media TV. Di PKS itu kan setiap tahun ada

²¹ Tajuddin (42 Tahun), Staff Ahli Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar 6 November 2017

²² Tajuddin (42 Tahun), Staff Ahli Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar 6 November 2017

²³ Busman Muin (50 Tahun), Departemen Internal PDIP Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar 10 November 2017

²⁴ Busman Muin (50 Tahun), Departemen Internal PDIP Provinsi Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar 10 November 2017

kemah untuk kader. Salah satu bentuk dukungannya itu persiapan kemah nanti untuk menggerakkan kader. Pas momennya ini kita coba hadirkan Pak Prof”.²⁵

d. Partai Amanat Nasional (PAN)

Pada pelaksanaan deklarasi NA-ASS peneliti turut hadir menyaksikan langsung. Namun PAN sebagai partai pengusung hanya diwakilkan oleh Mantan Ketua DPD Makassar, selain itu tak satupun pengurus wilayah terlihat saat itu. Menurut analisa peneliti ada ketidaksesuaian pendapat antara pengurus pusat dan pengurus wilayah. Ketidaksesuaian dimaksudkan adalah keinginan pengurus pusat dalam menentukan calon kandidat Gubernur yang diusungnya tidak sama dengan calon kandidat Gubernur yang ingin diusung pengurus wilayah (orang yang berbeda).

Beberapa waktu setelah deklarasi peneliti mencoba menghubungi pengurus DPW PAN untuk mengkonfirmasi mengenai dukungan dan ketidakhadiran pengurus wilayah PAN Sulawesi Selatan. Namun mereka enggan memberikan keterangan.

Hal ini pulalah yang menguatkan analisa peneliti bahwa calon kandidat Gubernur hanya ditentukan oleh pengurus pusat dan semua kader, baik itu itu pengurus wilayah sampai pengurus tingkat desa/kelurahan harus mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Keharusan inilah yang coba dilawan oleh pengurus wilayah PAN dengan ketidakhadirannya di acara deklarasi.

Pengurus DPW PAN yang awalnya diberitakan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar yang juga merupakan bakal calon Kandidat Gubernur kini diharuskan mengalihkan dukungan ke Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Kuat dugaan peneliti pengurus DPW PAN terbagi menjadi dua kubu.

²⁵ Rahman Rumaday (31 tahun), Ketua Deputy Jaringan Partai Keadilan Sejahtera, *Wawancara*, Makassar 15 November 2017

2. Menjaga Partai Pengusung supaya Tidak Mengalihkan Dukungannya

Sebelum pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dibuka secara resmi. Para calon masih merasa khawatir karena rekomendasi partai yang menjadi pegangannya juga masih memiliki peluang untuk mengalihkan dukungannya ke kandidat lain. Oleh karena itu selain memiliki strategi mendekati partai politik juga dituntut memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan partai politik agar tak mengalihkan dukungannya. Selain itu elektabilitas dan popularitas bakal calon harus tetap di kontrol agar tidak menurun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aktivitas *spin doctor* menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu :

1. Aktivitas *spin doctor* menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :
 - a. Aktivitas *spin doctor* Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar menjelang pemilihan Gubernur 2018 mendatang ialah sebagai berikut :
 - 1) Memaksimalkan kerja kader Partai Golkar sampai ke tingkat desa/kelurahan dengan melakukan musyawarah desa.
 - 2) Membentuk tim pemenangan dengan sebutan Gerakan Nurdin Halid Satu Tujuan yang disingkat dengan GNH17, dikoordinatori langsung oleh pengurus Golkar Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 3) Melakukan sosialisasi dengan membuat alat peraga seperti baliho dan banner untuk disebar dengan tujuan meningkatkan popularitas.
 - 4) Membuat program temu tokoh masyarakat agar mereka tahu bahwa Nurdin Halid-Aziz Kahar Muzakkar ini bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
 - b. Aktivitas *spin doctor* Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman menjelang pemilihan Gubernur 2018 mendatang ialah sebagai berikut :

- 1) Meminta restu tokoh masyarakat untuk maju sebagai bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan melakukan silaturahmi
 - 2) Mempersiapkan diri melalui pintu partai, baik itu siap fisik maupun materi
 - 3) Semua tim relawan dibentuk menjadi tim pemenang dengan dibuatkan struktur agar dapat di kontrol dengan mudah dan dapat dimonitoring secara baik melalui koordinator setiap kabupaten.
 - 4) Melakukan sosialisasi di kampus dengan cover kuliah umum
 - 5) Menjalin hubungan baik dengan semua media
- c. Aktivitas *spin doctor* Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar menjelang pemilihan Gubernur 2018 mendatang ialah sebagai berikut :
- 1) Mempromosikan kelebihan dan kegiatan sosialisasi kandidat
 - 2) Meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya
 - 3) Menyusun *tagline*
 - 4) Menyampaikan visi misi program prorakyat
- d. Aktivitas *spin doctor* Agus Arifin Nu'mang-Ahmad Tanribali Lamo menjelang pemilihan Gubernur 2018 mendatang ialah sebagai berikut :
- 1) Mempromosikan keberhasilan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2018 dan kegiatan sosialisasi kandidat
 - 2) Meredam berita negatif tentang kandidat yang diusungnya
 - 3) Menyusun *tagline*
 - 4) Menyampaikan visi misi program prorakyat
2. Strategi yang dilakukan *spin doctor* menjelang pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan

Keempat pasangan bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan pada dasarnya memiliki kesamaan strategi yaitu mendekati partai politik dan menjaga partai pengusung supaya tidak mengalihkan dukungannya.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

Dalam hal ini, peneliti memberikan saran yang berhubungan dengan aktivitas *spin doctor* menjelang pemilihan gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Tim pemenang dan relawan agar dalam perekrutan anggota tim harus lebih terstruktur agar mudah dikoordinasi
2. Penyebaran informasi harus lebih menyeluruh sampai ke tiap-tiap desa yang ada di Sulawesi Selatan sehingga mampu meningkatkan popularitas kandidatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Aminah, Siti. *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014
- Aziz Alimuddin, Abdul. "Pilgub Sulsel dan Pilkada di 12 Kabupaten Kota 2018, Takalar 2017", *Tribun Makassar*, 7 Februari 2016. <http://makassar.tribunnews.com/2016/02/07/pilgub-sulsel-dan-pilkada-di-12-kabupaten-kota-2018-takalar-2017-1:37> (Diakses 21 Juni 2017)
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Endarsawara, Suwardi. *Penelitian Kebudayaan : Ideologi, Epistimologi dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama. 2006.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- Hajar, Ibnu. *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Genta Press. 2015.
- Hamidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UNISMUH Malang. 2005.
- Handayani, Rivi. "Peran Spin Doctor dalam Pembentukan Opini Publik Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika dan Media Massa*, Vol. 16 no. 1 (April 2013). http://www.academia.edu/25850954/Peran_Spin_Doctor_Dalam_Pembentukan_Opini_Publik_terhadap_kandidat_kdh (Diakses 16 Juni 2017)
- Holik, Idham. *Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Madani. 2005.
- Jefkins, Frank dan Daniel Yadin. *Public Relations Edisi 5*. Terj. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga. 2003.
- J Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Juliardi, Budi. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

- Junaedi, Fajar. *Komunikasi Politik: Teori Aplikasi dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. 2013.
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma. 2010.
- Kh, Maman. *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Labolo, Muhamad dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Mc Nair, Brian. *An Introduction to Political Communication (Pengantar Komunikasi Politik)*. Terj. Imam Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- M. Hikmat, Mahi. *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2007.
- Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsinto. 1996.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*. Terj. Tjun Surjaman. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Pawito. *Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Jakarta: Jalasutra. 2009.
- Riswandi. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Said, Salim. *Kebijakan Elit Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Samsul, Wahidin. *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Siswanto Slamet, Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Subiakto, Henry dan Rachmah Ida. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2008.
- Sulastomo. *Demokrasi atau Democrazy*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Sukardi. *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

DATA JUMLAH PEMILIH DAN
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
SE SULAWESI SELATAN

NO	KABUPATEN
----	-----------



Dokumentasi setelah wawancara dengan Andi Rilman Abdullah di kediamannya, Bukit Baruga Antang pada hari Jumat, 22 Oktober 2017



Dokumentasi wawancara dengan Busman Muin di Kantor DPW PDIP Sulawesi Selatan, Jalan Gunung Bawakaraeng pada hari Jumat, 10 November 2017



Dokumentasi wawancara dengan Busman Muin di Kantor DPW PDIP Sulawesi Selatan, Jalan Gunung Bawakaraeng pada hari Jumat, 10 November 2017



Dokumentasi setelah wawancara dengan Busman Muin di Kantor DPW PDIP Sulawesi Selatan, Jalan Gunung Bawakaraeng pada hari Jumat, 10 November 2017



Wawancara bersama Bunyamin H Arsyad di Warkop Om Ben, Jalan Dg. Tata Raya pada hari Selasa, 24 Oktober 2017



Wawancara bersama Bunyamin H Arsyad di Warkop Om, Jalan Dg. Tata Raya hari Selasa, 24 Oktober 2017



Wawancara bersama Tajuddin di Ruang Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,
Jalan Jendral Urip Sumoharjo pada hari Senin, 6 November 2017



Wawancara bersama Tajuddin di Ruang Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,
Jalan Jendral Urip Sumoharjo pada hari Senin, 6 November 2017



Wawancara bersama Rahman Rumaday di Kantor DPW PKS Provinsi Sulawesi Selatan,
Jalan Perintis Kemerdekaan pada hari Jumat, 17 November 2017



Wawancara bersama Rahman Rumaday di Kantor DPW PKS Provinsi Sulawesi Selatan,
Jalan Perintis Kemerdekaan pada hari Jumat, 17 November 2017



Dokumentasi wawancara bersama Muhammad Yusuf Said di Cafe Yellow, Jalan Bonto Lempangan pada hari Senin 23 oktober 2017



Dokumentasi wawancara bersama Muhammad Yusuf Said di Cafe Yellow, Jalan Bonto Lempangan pada hari Senin 23 oktober 2017



Dokumentasi wawancara bersama Arfandy Idris di Kantor DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Bontolempangan pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017



Dokumentasi wawancara bersama Arfandy Idris di Kantor DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Bontolempangan pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017



Dokumentasi wawancara bersama Lili Mulyani di Rumah Pemenangan Tim Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar, Jalan Bontolempangan pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017



Dokumentasi wawancara bersama Lili Mulyani di Rumah Pemenangan Tim Ichsan Yasin Limpo-Andi Muzakkar, Jalan Bontolempangan pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017

Tabel Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

Wilayah Sulawesi Selatan	Luas Area (km ²)	Presentase Luas Wilayah (Persen)
Kepulauan Selayar	904	1.97
Bulukumba	1 155	2.52
Bantaeng	396	0.86
Jeneponto	903	1.97
Takalar	567	1.24
Gowa	1 883	4.12
Sinjai	820	1.79
Maros	1 619	3.54
Pangkajene Kepulauan	1 112	2.43
Barru	1 175	2.57
Bone	4 559	9.96
Soppeng	1 359	2.97
Wajo	2 506	5.48
Sindereng rappang	1 883	4.12
Pinrang	1 961	4.29
Enrekang	1 786	3.90
Luwu	3 000	6.56
Tana Toraja	2 054	4.49
Luwu Utara	7 503	16.39
Luwu Timur	6 945	15.18
Toraja Utara	1 151	2.52
Makassar	176	0.38
Pare-pare	99	0.22

Palopo	248	0.54
Sulawesi Selatan	45 765	100

(Sumber : situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan)



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

Nomor : 09-442/Rekam/DPP-GERINDRA/2017

Lamp. : -

Hal : Rekomendasi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023

Kepada Yth.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERINDRA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Di -

Kota Makassar

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil rapat Badan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DPP Partai GERINDRA, maka bersama ini kami sampaikan :

1. DPP Partai GERINDRA menyetujui dan merekomendasikan :

- **Sdr. Prof. Dr. NURDIN ABDULLAH, M.Agr** sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023.
- **Sdr. ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST** sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023.

2. Untuk itu DPD Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Selatan agar segera melakukan koordinasi dengan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal persiapan pencalonan tersebut.

3. Selanjutnya DPD Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Selatan mengamankan dan memenangkan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur ini dengan mengerahkan semua potensi yang ada serta melibatkan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta pengurus DPC, PAC dan Ranting Partai GERINDRA di daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.

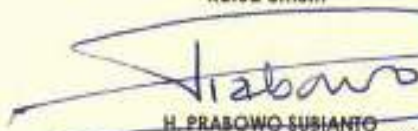
4. Rekomendasi ini dibuat untuk dilaksanakan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 September 2017

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
(DPP PARTAI GERINDRA)**

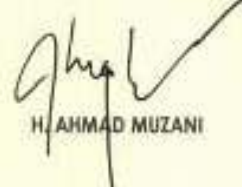
Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum


H. PRABOWO SUBIANTO

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Prof. Dr. NURDIN ABDULLAH, M.Agr di Kota Makassar.
2. Sdr. ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST di Kota Makassar.
3. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekretaris Jenderal


H. AHMAD MUZANI

RIWAYAT HIDUP



Penulis dari skripsi “Aktivitas Spin Doctor menjelang Pemilihan Gubernur 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan” bernama Sry Ayu B. Madjid, merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara. Penulis lahir di sebuah desa yang berada di bagian selatan pulau Sulawesi, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 09 Mei 1995 dari pasangan seorang Ayah bernama Bahar Madjid, SP, MM dan Ibu bernama Marwani, S.Sos.

Pendidikan yang telah ditempuh TK lulus pada tahun 2000, SD Negeri 4 Arawa Sidrap lulus pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Bantaeng lulus tahun 2010, SMA Negeri 1 Bantaeng lulus tahun 2013. Ketika duduk dibangku sekolah menengah, ia aktif diberbagai organisasi ekstrakurikuler, diantaranya PMR, Sanggar Seni, kelas puisi, Paskibraka Sekolah, dan OSIS.

Pada tahun 2013 ia melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengambil program S1 di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi lulus pada tahun 2017. Semasa kuliah, ia aktif di kegiatan internal Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, juga aktif di DEMA (Dewan Mahasiswa) Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai wakil bendahara periode 2015-2016. Ia juga pernah mengikuti Basic Training HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan. Selain itu ia aktif di komunitas kepenulisan yang dibentuk bersama teman-teman seangkatannya yang dikenal dengan GRAPIK dan komunitas desain THYPOGRAPHY..